

346.05
SYA
P 21

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU**
(Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang)



Tesis
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Oleh :
ABDI SYAIFULLOH, SH
B4B.001.090

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU**
(Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang)

oleh :

ABDI SYAIFULLOH, SH
NIM. B4B. 001. 090

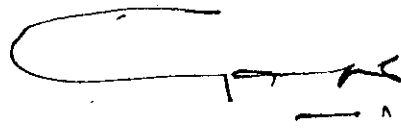
Telah di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada tanggal : 16 September 2003

Pembimbing Utama

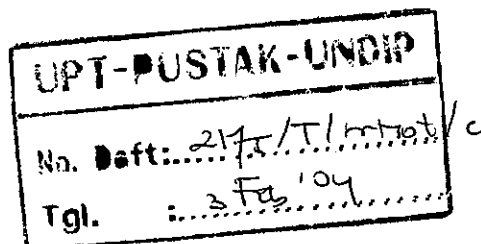


SRI SUDARYATMI, SH, M.Hum
Nip. 131.673.421

Mengetahui
Ketua Program
Magister Notariat



Prof. IGN. SUGANGGA, SH
Nip. 130.359.063



ABSTRAKSI

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang (Studi kasus di kota Semarang), Abdi Syaifullah, SH. 103 halaman. Tesis, Semarang. program Megister Kenotariatan kegiatan hukum waris adat program pasca sarjana Universitas Diponegoro.

Kalau kita lihat ciri khas daerah Minangkabau, adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menyumpai masyarakat yang tersusun dan teratur menurut tertib hukum ibu. (matrilineal)

Seorang anak termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga ibu dan anak, sehingga dalam hal warisan apabila yang wafat itu seorang suami, maka anak – anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak – anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri oleh karena itu maka harta pencahariannya tidak diwariskan oleh anak – anaknya tetapi diwaris oleh saudara – saudara sekandungnya.

Ketentuan adat waris tersebut diatas sudah berubah, terutama dikalangan keluarga. Keluarga Minangkabau yang merantau di luar daerah aslinya. Tetapi juga di daerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan jaman ini nampak sangat jelas adanya pergeseran makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi Somah di dalam masyarakat, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami - istri – anak lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat dari pada ikatan hubungan kekeluargaan famili. Dan dengan lebih eratnya ikatan kekeluargaan Somah (suami – istri – anak-anak) ini, maka kemungkinan anak – anak menjadi ahli waris dari pada bapaknya, menggantikan saudara – saudara sekandung bapaknya. Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila meninggal hartanya akan digugat oleh kamanakan-kamanakannya. Sebelum ia meninggal telah menuliskan hartanya dengan cara hibah wasiat kepada anak-anaknya.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis – empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Minangkabau perantau di Kota Semarang, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan masyarakat Minangkabau di Semarang dan perkumpulan masyarakat Minang di Semarang. Lokasi penelitian umumnya masih di dalam lingkup kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pada pewarisan masyarakat Minangkabau perantau yang dulunya menggunakan sistem kewarisan kolektif berubah menjadi sistem kewarisan individual.

ABSTRACTION

The division of execution an inheritance at the Minangkabau society settlement in Semarang city. (case study in Semarang city) Abdi Syaifullah SH. 103 pages. Thesis Semarang program magister work law activities inheritance tradition pasca sarjana program Universitas Diponegoro.

If we see characteristic of Minangkabau regency is the place in Indonesian where's the people see the society who management and regularly according to legal order (matrilineal).

A child influence her mother family and no father's family. A father available in the out side mother family and child so that inheritance from work property because the children to from member her mother family in order to her father no, her father exist to from member family him self because of that so ... property no inheritance by the children but to be inheritance by own brother (sister).

The existence tradition mentions above changes already, excellent family surrounding. Minangkabau family who settlement in the out of origin regency, but also in Minangkabau regency in the development this period seem very clear available moving up longer and longer giving position who important to husband in society, so that bounding communicate husband and wife familiar, children later become more important and more solid more than bounding connecting familiar. And more solid with bounding familiar husband (husband, wife, children) this, so possibility children become relative inheritance more than their father, to replace their father own brother. A father worried later if die his goods will be claim by their niece. Before he die had writing his goods with present testament way to their children.

This writing method research juridical.- empiric and aspect descriptive analysis, that is result who was getting from this research had been wish can giving picture all round way and systematic about execution division goods inheritance to society Minangkabau settlement in Semarang city. Who was them to be analysis so that can be take conclusion general way. This wetting based on result of interview with society of Minangkabau in Semarang city and Minang group society in Semarang : location research generally still in surround Semarang city.

The result of research to show available changes at society inheritance of Minangkabau settlement who long ago used system inheritance collective change become system individual inheritance.

Ya Alloh

Karuniakan kepada kami cinta-Mu dan cinta orang – orang yang
mencintai-Mu, serta segala sesuatu yang mendekatkan

kami kepada cinta-Mu

(Do'a Rosulullah SAW, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Muadz)

aku menyelam dikedalaman kesadaranku dan melihat sebuah semesta rahasia
alam tersembunyi : Adam dan Hawa tidak muncul dari dunia

(Syekh Jalaludin Rumi)

Dedicated for :

Papa tambun/Munandar, mama Margawati : Atas kasih, cinta, do'a, kehangatan
dan kepercayaan

My Big Family : Abdilah Rokman, Esti Trianawati, Arif Fatullah, Bambang
Purnama, Tia, Thanks for always care and loving me

Thank's to may heart : Zhia, SH for to take care n' your support to me

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tekun/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,



ABDI Syaifulloh, SH

B4B001090

KATA PENGATAR

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk melestarikan hukum adat, beserta bentuk tradisinya yang mulai menghilang yang mana pada dasarnya adat itu sendiri merupakan asset kekayaan terbesar milik bangsa Indonesia.

Namun dalam keadaan nyatanya, kebudayaan dari suatu dari suatu suku bangsa, terutama dalam hukum adat beserta tradisinya, mengalami perkembangan – perkembangan dan perubahan – perubahan yang mengarah kepada hilangnya keaslian dari adat itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang hukum adat khususnya dalam sistem pewarisannya, dalam sebuah tesis yang penulis susun dengan judul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang)”

Dari persiapan sampai dengan penyelesaian tesis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, dengan segala ketulusan serta menyadari bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini terselesaikan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis miliki, sehingga tesis ini jauh dari sempurna maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan senang hati. Untuk itu, maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada Ibu Hj. Sri Sudaryatni, SH, M.Hum, selaku pembimbing dan

Bapak Sukirno, SH, MSi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan kepada penulis pengarahan, masukan – masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyesuaian penulisan tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Ir Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak prof. I.G.N Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Hj. Budi Gutami, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Segenap Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Segenap Staff dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

9. Bapak Masril Sofyan selaku Ketua Ikatan Keluarga Minang di Semarang, yang telah memberikan keterangan – keterangan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
10. Ibu Lina, selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan keterangan – keterangan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
11. Bapak Kuncoro, yang telah memberikan keterangan – keterangan yang berkenaan dengan penulisan tesis ini.
12. Segenap masyarakat Minangkabau yang berada di Semarang, atas segala dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.

Dengan tulisan ini pula, penulis berharap dapat memberikan sedikit manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAKSI.....	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
ISTILAH ADAT	xii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Hukum Adat	15
B. Hukum Perkawinan Adat	20
B.1 Tinjauan Umum Perkawinan Adat	20
C. Hukum Keluarga	23
C.1 Pengertian Hukum Keluarga Adat.....	23
C.2 Sistem Keturunan.....	26
C.3 Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Orang Tua ..	27
C.4 Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Sanak Keluarga	28
D. Hukum Waris Adat	29
D.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	29
D.2 Asas – Asas Hukum Waris Adat	31
D.3 Sistem Kewarisan	33
D.4 Harta Warisan.....	34

	D.5 Ahli Waris	36
	D.6 Perubahan Hukum Waris Adat.....	39
BAB	III METODE PENELITIAN.....	45
	A. Metode Pendekatan	46
	B. Spesifik Penelitian.....	46
	C. Lokasi Penelitian	46
	D. Jenis dan Sumber Data	47
	E. Penentuan Populasi dan Sampel.....	48
	F. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	49
	F.1 Teknik Pengumpulan Data.....	49
	F.1.1 Informasi penelitian	49
	F.1.2 Wawancara dan Interview.....	50
	F.1.3 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	51
	F2. Teknik Pengolahan Data	53
	G. Analisa Data	53
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Hasil Penelitian	55
	B.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	55
	1.1 Sejarah Berdirinya Ikatan Keluarga Minangkabau di Semarang (IKMS).....	55
	1.2 Kehidupan Masyarakat Minangkabau di Semarang.....	58
	B.2. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau.....	62
	2.1 Susunan Masyarakat Minangkabau	62
	2.2 Hukum Adat Masyarakat Minangkabau	66
	B.3. Sistem Pewarisan Adat Matrilineal Pada Masyarakat Minangkabau.....	69
	3.1.Harta Warisan Dalam Hukum Adat Waris Minangkabau.....	72
	3.2.Ahli Waris Dan Hak Mewaris Menurut Adat Minangkabau	73

B.4.	Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau.....	80
4.1.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang.....	86
B.	Pembahasan	91
B.1.	Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang.....	91
B.2.	Hambatan – Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Serta Cara Penyelesaiannya	93
B.3.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang.....	98
BAB V	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran – Saran.....	102
LAMPIRAN		

ISTILAH ADAT

1. Nagari : Persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor geneologis dan faktor territorial
2. Jurai : Keluarga yang sedapur, karena tiap – tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku – tungku baru untuk memberi makan anak – anaknya.
3. Penghulu andika : Seorang yang berkuasa dalam sebuah negeri biasanya seorang laki – laki dari garis ibu.
4. Sa-induk, Sa-mandeh : Segala orang yang berasal dari seorang ibu
5. Paruik : Suatu keluarga besar (famili)
6. Suku : Suatu kesatuan masyarakat, dimana anggota – anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka.
7. Teratak : Tempat kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampung atau negeri.
8. Kota : Daerah pusat dari daerah mana kemudian berkembang menjadi nagari
9. Ganggam nan bauntuak : Harta keluarga yang mempunyai hak memakai.
10. Warih nan dekek : Ahli waris nan dekat.
11. Warih nan gauh : Segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu.
12. Harta pustaka : Harta warisan yang tidak boleh dibagi – bagi melainkan kaumnya boleh memakai.
13. Harta pencaharian : Harta hasil pencaharian suami – istri sewaktu suami – istri masih hidup di dalam tali perkawinan.

14. Harta suarang : Harta yang diperoleh sebagai pencaharian selama perkawinan
15. Pusaka indak buliah pindah : Pusaka tidak boleh pindah.
16. Harta bersama : Harta yang dibina selama perkawinan, termasuk harta benda yang dibawa oleh masing – masing dalam perkawinan sebagai hadiah
17. Matrilineal : Pertalian darah menurut garis ibu
18. Patrilineal : Pertalian darah menurut garis bapak
19. Parental : Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak
20. Sistem kewarisan individual : Sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi – bagi diantara para ahli waris.
21. Sistem kewarisan kolektif : Sistem kewarisan dimana harta peninggalan itu diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama – sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pustaka, tidak boleh dibagi – bagi kepemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan harta boleh dibagi – bagikan pemiliknya kepada pemilik (hanya mempunyai hak pakai saja)
22. Sistem kewarisan mayorat : Sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris kekeluarganya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak.
23. Genealogische factor : Persekutuan – persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama.
24. Teritoriale factor : Persekutuan – persekutuan hukum, dimana warganya terikat dalam suatu daerah, wilayah.
25. Geneologis territorial : Persekutuan – persekutuan hukum, dimana warga geneologis maupun faktor territorial

26. Exogami dua perumusan :

- a. Dalam arti positif : Eksogami adalah suatu sistem perkawinan, dimana seorang harus kawin dengan anggota keluarga yang lain.
- b. Dalam arti negatif : Eksogami adalah suatu sistem perkawinan dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota se-clan

27. Semanak : Anak – anak yang tahu dari seorang ibu.

28. Tunggangi : Saudara lelaki tertua dari ibu

29. Hubungan tali darah : Hubungan antara mereka yang berasal dari satu keturunan menurut garis ibu.

30. Hubungan tali budi : Hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari, yang pindah ke nagari lain dan menetap.

31. Hubungan tali emas : Hubungan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar rumah minang, yang di terima di dalam persukuan minang dengan membayar semacam upeti (uang emas).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang didiami oleh bermacam-macam suku bangsa. Masing-masing suku bangsa mempunyai bahasa, suku, adat-istiadat, hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda-beda, kenyataan itu memang harus dihadapi ; yang lebih penting adalah bagaimana mengelola kemajemukan itu. Hal ini sangat penting untuk dipikirkan, di programkan dan diterapkan sebab hal ini antara lain menyangkut masalah bagaimana menyelaraskan hubungan antar suku bangsa.

Keanekaragaman itu merupakan pilar-pilar penyanggah bagi tumbuhnya potensi Integratif bangsa, yang dalam hal ini mempunyai dasar Idiil dan Spiritual adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya kerukunan dan persaudaraan menjadi elemen dasar bagi terciptanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia didalam suasana lingkungan rakyat, merupakan persekutuan-persekutuan yang disebut persekutuan hukum.

Menurut Chairul Anwar persekutuan hukum adalah : persekutuan manusia-manusia yang terikat dalam satu kesatuan, yang anggota-anggotanya satu sama lain memandang sesama mereka didalam segenap segi perhubungan hidup, serta mempunyai orang-orang tertentu yang berkuasa, yang bertindak atas mana serta buat kepentingan kesatuan itu seluruhnya.¹

¹. Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1997, halaman 8.



Pada dasarnya dalam masyarakat Indonesi (dahulu atau sekarang) terdapat tiga persekutuan hukum yaitu :

1. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (*genealogische faktor*) adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan persekutuan hukum *Geneologis* (*Genealogische Rechts gemeenschap*).
2. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (*grandgebied*) yang tertentu dimana faktor teritorial (*territoriele faktor*), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut persekutuan hukum teritorial (*Territoriale Rechtsgemeenschap*).
3. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan hukum seperti ini disebut dengan persekutuan *hukum Geneologis Teritorial* (*Geneologisch Territoriale Rechtsgemeenschap*).²

Persekutuan-persekutuan yang berada didalam suasana hukum adat itu hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecil-kecil seperti : nagari, desa dan sebagainya. Masing-masing persekutuan tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota didalam lingkungannya. Antara anggota dengan kesatuan terdapat hubungan erat, anggota-anggota merupakan dari kesatuan tersebut, didalam pertaliannya dengan kesatuan itu seluruhnya. Untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan persekutuan tersebut, orang-orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.

². Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Jakarta 1998, halaman 68.

Masing-masing persekutuan itu mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum. Di Indonesia sejak dahulu sudah hidup dan berkembang hukum asli dari bangsa Indonesia yang dikenal dengan hukum adat yang hidup dan berlaku antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda.

Sebutan hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Adat recht*" yaitu suatu istilah pertama dipakai oleh *Dr. Snouck Hurgronge* didalam bukunya yang berjudul orang-orang Aceh dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum. Kemudian istilah *adat recht* itu diambil alih oleh *Van Vollenhoven* menjadi istilah teknis dan pengetahuan hukum didalam bukunya yang berjudul hukum adat hukum Belanda. Menurut *Van Vollenhoven* hukum adat adalah : "keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putera-timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagi pula tidak dikodifikasikan".³

Dari Pengertian tersebut maka terdapat tiga unsur penting, yaitu :

1. Hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku dari orang bumi putera (Indonesia asli) dan orang-orang yang berasal dari dunia timur tetapi asing di Indonesia (seperti Cina, India, Arab dan sebagainya).
2. Keseluruhan aturan tingkah laku itu dibedakan dua macam. Yaitu aturan yang mempunyai sanksi maka dikatakan hukum dan yang tidak dikodifikasi maka disebut adat.
3. Aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi itu tidak tertulis dalam bentuk Undang-undang.

³. Buhsar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta 1998, halaman 2.

Hukum adat menurut Ter Haar adalah keseluruhan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Yang dimaksud fungsionaris hukum seperti kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat desa, yang memberikan keputusan didalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena kesesuaian dengan kesadaran hukum masyarakat.

Jadi Ter Haar mengartikan keputusan sebagai berikut : “Hukum Keputusan, yaitu hukum yang terletak dalam keputusan para petugas hukum adat, baik berupa keputusan karena perselisihan maupun karena masalah lainnya.”⁴

Hukum adat di seluruh Indonesia beranekaragam yang menyebabkan keanekaragaman pola dalam sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Berbicara tentang sistem pewarisan tidak dapat lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Apabila masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, berkepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabat yang berbeda pula. Tetapi walaupun demikian, pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki – laki, dimana sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki – laki dalam hukum waris sangat

⁴. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung Alumni 1990, halaman 31.

menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki – laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk dengan cara “Kawin Jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuannya yang meninggal dunia.

2. Sistem Matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, didalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Didalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵

Kalau kita meninjau lagi persekutuan hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah persekutuan hukum geneologis territorial. Untuk daerah Minangkabau, lebih banyak menggunakan persekutuan hukum geneologis

⁵. Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico Bandung 1985, halaman 49.

territorial. Hal ini dapat dilihat didalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya nagari pada masyarakat Minangkabau.

Seperti di Jawa, buat desa, faktor teritoriallah (daerah) sebagai unsur pokok yang merupakan tali pengikat, di Minangkabau kita menjumpai faktor geneologis yang mengikat kasatuan itu. Suatu masyarakat yang hanya diikat oleh faktor geneologis (pertalian darah) saja, tentulah akan menjumpai kesukaran untuk menentukan batas-batas kediaman mereka, maka oleh karena itulah gabungan dari kedua unsur pengikat tersebut, unsur territorial dan unsur geneologis kita dapati sebagai unsur pengikat persekutuan hukum di Minangkabau (nagari).

Faktor geneologis yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau yaitu, faktor geneologis yang dilihat dari keturunan ibu, yang bisa disebut orang dengan istilah Matrilineal. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu, dan unsur inilah yang memegang peranan didalam organisasi masyarakat Minangkabau.

Sementara itu Amir Syarifuddin mengatakan bahwa : “Adat Minangkabau dalam kekerabatan menggaris keturunan ibu atau dapat disebut sistem Matrilineal/bentuk, maka berarti di Minangkabau yang berkuasa adalah pihak perempuan atau pihak ibu artinya adalah segala segi atau kekuasaan terletak pada ibu”.⁶

Hukum waris menurut masyarakat dengan sistem Matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik

⁶. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta 1984, halaman 82.

laki-laki maupun perempuan. Secara garis besar harta warisan masyarakat Minangkabau di bagi menjadi empat macam yaitu :

1. Harta pusaka dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat yang dipimpin oleh penghulu andika.
 - b. Harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga yang paling kecil yang terdiri dari istri dengan anak-anaknya atau suami dengan saudara-saudaranya sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.
2. Harta pencaharian adalah harta hasil pencaharian suami-istri sewaktu masih hidup di dalam tali perkawinan.
3. Harta suarang adalah harta bersama suami-istri yang dikelola sehingga suami mempunyai hak didalamnya.

Karena dilatar belakangi persekutuan geneologis territorial maka masyarakat Minangkabau perantau berorientasi di dalam kehidupan kesehariannya selalu berhubungan satu dengan yang lainnya walaupun diluar kampungnya. Mereka tetap membuat suatu perkumpulan kekeluargaannya baik dalam suatu perkumpulan yang dipautkan karena satu keturunan dalam satu silsilah keluarganya, tetapi juga membuat suatu keterkaitan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Orang Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang suka merantau dengan tujuan untuk mencari penghasilan atau bekerja baik sebagai pejabat pemerintah, pegawai swasta maupun bekerja sebagai wiraswasta, misalnya

berdagang membuat rumah makan padang dan sebagainya. Masyarakat Minangkabau ini biasanya membentuk kelompok atau perkumpulan warga Minangkabau untuk membina persaudaraan dan silaturahmi antara mereka, demikian juga di Semarang.

Perkumpulan ini pada dasarnya merupakan wahana untuk mengikat kekerabatan dan sebagai sarana untuk mempermudah beradaptasi dengan daerah yang didatanginya. Selain itu juga sebagai tempat persinggahan awal bagi masyarakat Minangkabau yang perantau, sebelum mereka mendapat tempat tinggal yang tetap.

Masyarakat Minangkabau yang sudah lama tinggal di Semarang dan menyatu serta beradaptasi dengan daerah yang didatanginya sehingga akan berakibat adanya suatu perubahan baik dalam hal kekerabatannya maupun dalam warisan yang dulu di daerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem Matrilineal, sedangkan di daerah perantau (Semarang) hukum warisnya berdasarkan sistem Parental, maka ia cenderung mengikuti sistem di perantau yaitu hukum waris berdasarkan sistem Parental, dimana kedudukan waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama serta mereka mewaris pada ibu dan bapaknya.

Adanya perubahan pewarisan itu akan menimbulkan suatu persoalan terutama dalam harta pencaharian, kebanyakan semasa mereka hidup (suami-istri) harta pencahariannya telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila seseorang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli warisnya. Terhadap hibah ini kerab juga kelihatan jika harta tersebut banyak dan besar nilainya para

kemenakan biasanya tidak tinggal diam. Mereka juga ingin memperoleh bagian dari harta tersebut, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan.

Akan tetapi apabila hal ini betul-betul terjadi, serta dapat diselesaikan secara bijaksana sering juga tampaknya, si anak yang menurut hibah ayahnya, dialah ahli waris dari harta tersebut. Kemudian dengan mufakat memberikan juga kepada kemenakan-kemenakan tadi bagian dari harta pencaharian ayahnya tersebut.

Gugatan atau keberatan kemenakan untuk menjadi ahli waris ini sering terjadi jika si suami tersebut seorang yang kaya yang kemudian meninggal dunia. Hal ini dapat terlihat pada kasus Bapak Yahirman, pensiunan AL (Angkatan Laut) yang pindah dari Pariaman Padang pada tahun 1982, mereka hidup di Semarang dengan buka usaha warung makan Padang.

Dan meninggal pada tahun 1990 dengan meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri. Pada waktu masih hidup Bapak Yahirman telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya sebagai berikut :

1. Satu buah rumah makan diwariskan kepada anak laki-laki nomor dua
2. Satu buah rumah susun diwariskan kepada anak perempuan (anak terakhir).
3. Sedangkan untuk dua mobil dan empat buah sepeda motor diwariskan kepada anak pertama.

Karena menurut adat Minangkabau apabila yang meninggal itu seorang laki-laki maka ahli warisnya adalah dansanak kandung yaitu saudara laki-laki, atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu-sebapak. Oleh karena itu maka saudaranya merasa sebagai ahli waris mengajukan keberatan atau gugatan kepada

anak-anak bapak yatman. Dari contoh tersebut diatas tampak bahwa masyarakat Minangkabau perantau telah mengalami perubahan dalam masalah pembagian warisan.

Tetapi juga di daerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan jaman ini tampak jelas adanya pergeseran yang makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi somah didalam masyarakat sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami-istri lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat dari pada ikatan hubungan kekeluargaan famili.

Dan dengan lebih eratnya ikatan kekeluargaan somah (suami, istri, anak-anak) ini, maka kemungkinan anak-anak menjadi ahli waris daripada bapaknya menggantikan saudara-saudaranya sekandung bapaknya kiranya tidak dapat ditahan lagi.

Dari hal-hal inilah yang melatar belakangi penelitian, yang berjudul :
“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU” (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang).

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di Kota Semarang ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau perantau dan bagaimana penyelesaian ?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian ini maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau perantau khususnya di kota Semarang.
2. Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang dan cara penyelesaiannya.
3. Untuk memberikan kejelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum waris pada masyarakat Minangkabau perantau.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat/kontribusi sebagai berikut :

1. Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana bentuk dari suatu struktur kekeluargaan/kekerabatan dari adat

Minangkabau beserta perubahan-perubahan dan perkembangan khususnya dalam hal pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau.

2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Berisi Pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu : Latar Belakang, Permasalahan, Originalitas Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

Latar Belakang berisi alasan Penulis memilih Penelitian tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang.

Permasalahan berisi Pertanyaan mengenai, Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang, Hambatan-Hambatan Apakah yang timbul dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minangkabau perantau dan bagaimana penyelesaiannya, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan hukum waris pada masyarakat Minangkabau di Semarang.

Originali Penelitian atau Keaslian Penelitian menjelaskan bahwa Penelitian yang dilakukan Penulis belum pernah dilakukan oleh Penulis lainnya, sejauh Pengetahuan Penulis.

Tujuan dan Manfaat penelitian menguraikan tujuan dilakukan Penelitian Serta Manfaat Penelitian Secara Praktis dan Teoritis.

Sistematika Penulisan berisi uraian Kerangka atau Sistematika penulisan yang dibuat, yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Serta Kesimpulan dan Saran.

Bab II Berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu :

Tinjauan Mengenai Hukum Adat, Tinjauan Mengenai Hukum Perkawinan Adat, Tinjauan Mengenai Hukum Kekeluargaan Adat, Tinjauan Mengenai Hukum Waris Adat Gibagi Lagi Dalam Beberapa sub-sub bab yaitu : Pengertian Hukum Waris Adat, Asas-Asas Hukum Waris Adat, Sistem Pewarisan, Harta Warisan, Ahli Waris, Perubahan Hukum Waris Adat.

Bab III Berisi Metode Penelitian terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu : Metode

Pendekatan, Spesifik Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Dan Sumber data, Penentuan Populasi Dan Sampling, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Metode Analisa Data.

Bab IV Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hasil Dari Penelitian yang didapat dari data primer maupun data sekunder tersebut dirangkum dalam 6 (enam) sub bab yaitu : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran umum masyarakat Minangkabau, Sistem pewarisan adat Matrilineal pada masyarakat Minangkabau, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang, Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang dan penyelesaiannya, Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minangkabau di kota Semarang.

Bab V Berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan memuat Hasil dari bab I (satu) sampai bab 5 (lima), sedangkan saran berisi Pendapat Penulis dari Penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Sebagaimana diketahui, manusia sejak lahir telah dianugrahi suatu naluri untuk hidup bersama, naluri yang dinamakan *Gregarious Instinct*. Hal ini disebabkan oleh karena manusia tidak dilengkapi dengan sarana untuk mendapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasarnya, tanpa kerjasama dengan orang lain. Sebagai akibat dari adanya naluri itu dan atas dasar pikiran, kehendak dan perasaan, maka timbul hasrat yang kuat untuk bergaul, yang kemudian menghasilkan interaksi sosial yang dinamis.

Secara sosiologis, proses interaksi sosial yang dinamis itu menghasilkan cara atau *usage* yang kemudian melembaga, yang sebenarnya merupakan bentuk tertentu dari perilaku manusia. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi negative yang terlalu berat, tetapi hanyalah sekedar celaan dari pribadi lain dengan siapa orang melakukan hubungan atau interaksi sosial.

Apabila suatu bentuk perbuatan itu atas dasar pengalaman bergaul dianggap sebagai sesuatu yang baik, perbuatan itu mungkin menjadi kebiasaan atau *folkways* yang merupakan perbuatan yang di ulang – ulang dalam bentuk yang sama. Ciri – ciri utama dari adanya kebiasaan itu antara lain :

1. Perbuatan nyata yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama.
2. Perbuatan itu disukai oleh orang.
3. Kekuatan mengikatnya lebih besar dari pada caranya.⁷

⁷ Soejono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kunai Sea, akarta, 1981, halaman 34.

Kalau kebiasaan itu diakui dan diterima serta dianggap sebagai kaidah – kaidah pengatur kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau *Mores*. Ciri – ciri pokok tata kelakuan atau mores adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat
2. Merupakan kaidah yang memerintahkan atau melarang terjadinya suatu perbuatan sehingga dianggap sebagai patokan atau pedoman yang membatasi sepak terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasikan pribadi dengan kelompok
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas atau integritas masyarakat.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola perilaku warga masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya dan kemudian menjadi adat istiadat atau *Custom*. Secara analitis, demikianlah tahapan – tahapan perkembangan gejala – gejala sampai menjadi adat istiadat.⁸

Hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, tetapi menjadi cerminnya. Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya tersendiri pula ; tiap masyarakat rakyat mempunyai cara berfikir “*Geestesstructuur*” yang tersendiri. Maka hukum di dalam suatu masyarakat, sebagai salah satu perwujudan *geestesstructuur* dari masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak, sifat yang tersendiri pula dengan perkataan lain hukum masing – masing masyarakat adalah berlainan. Dengan demikianlah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh *van savigny*, bahwa hukum mengikuti “*volkgeist*” masing – masing masyarakat, dimana hukum itu hidup tumbuh dan berkembang. Karena *volkgeist* masing – masing masyarakat itupun berlainan.⁹

Hukum merupakan bagian dari sistem norma – norma yang secara sosiologis dibuat dan diperkuat oleh lembaga – lembaga atau pihak – pihak yang

⁸ Ibid, halaman 35.

⁹ I.Gusti Ketut, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta 1987, halaman 5.

berwenang. Lembaga – lembaga atau pihak – pihak yang berwenang tergantung pada masyarakat itu. Proses pengkaidahan itu mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat yang karena kepercayaan masyarakat mempunyai kekuasaan dan kewibawaan. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata – mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun adanya hukum yang memang berdasarkan ketetapan oleh proses pengkaidahannya dilakukan oleh penguasa yang dianggap berwenang oleh masyarakat.

Selain itu, apabila hukum itu memang sudah ada maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum itu. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan itu, maka terjadilah proses sosial engineering, sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yangtelah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau soaial control.

Untuk mengetahui apakah hukum adat itu, pertama – tama marilah kita ikuti dahulu apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat di bawah ini :

- a. Soepomo, hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah Hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam hukum adat inipun melengkapi hukum yang berdasarkan keputusan – keputusan dan Hakim yang berisi asas – asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat darurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dari sifatnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University 1989, halaman 161

- b. Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan – aturan kelakuan yang berlaku bagi orang – orang pribumi dan orang – orang Timur Asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak tidak di kodifikasi (maka yang dikatakan adat).¹¹

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi golongan penduduk sebagaimana di sebut dalam pasal 163 Indische Staats regeling (IS) yang terdiri dari orang – orang Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing. Hukum adat hanya berlaku bagi orang – orang Cina, Arab, India dan sebagainya yang tidak beragama Kristen. Jadi huku adat tidak berlaku bagi golongan Eropa, termasuk orang – orang jepang dan semua penduduk yang hukum kekeluargaan mempunyai asas – asas yang sama hukum Belanda.¹²

- c. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan – keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹³

Yang dimaksud fungsionaris hukum ialah seperti Kepala Adat, para hakim, Rapat Desa, Wali tanah, Pejabat Agama dan Para pejabat Desa, yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan keadaan hukum masyarakat.¹⁴

Jadi hukum adat menurut Ter Haar adalah hukum keputusan yaitu hukum yang terdapat di dalam keputusan para petugas hukum adat, baik berupa keputusan karena perselishan maupun karena masalah adat lainnya. Dengan demikian nampak perbedaan antara Ter Haar dan Van Vollenhoven mengenai terjadinya hukum adat. Jika Van Vollenhoven

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat* Alumni Bandung 1980, halaman 26

¹² Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Pradnya paramitha, Jakarta 1972, halaman 12.

¹³ Imam Sudiyat, *Asas – asas hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta 1978, halaman 7.

¹⁴ Soeryono Soekamto, *Masalah Kedudukan Peranan Hukum Adat*, Akademika Jakarta 1979 halaman 8.

menganggap adat sudah menjadi hukum adat apabila adat itu sudah seharusnya dituruti anggota masyarakat, sedangkan Ter Haar adat itu bukanlah hukum adat apabila tidak dipertahankan dalam bentuk keputusan para pejabat adat. Pada saat adanya keputusan adat maka saat adat itu menjadi hukum adat. Jadi menurut Ter Haar apa yang telah diputuskan saja menjadi hukum adat.

- d. Hazairin, Hukum adat adalah respan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah – kaidah adat itu berupa kaidah – kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁵

Di dalam masyarakat hukum adat nampak dalam tiga wujud hukum adat, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*) merupakan bagian yang terbesar
- b. Hukum yang tertulis (*Jus scriptum*) hanya sebagian kecilnya saja, misalnya peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan raja – raja atau saultan – sultan dahulu seperti pranata – pranata di Jawa, peswara peswara atau titisswara – titisswara di Bali dan Sarakata – sarakarta di Aceh.
- c. Uraian – uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian – uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian riset yang dibukukan, seperti antara lain buku – buku hasil : Djoyodiguna/Tirtawinata yang berjudul “Hukum Perdata Adat Jawa Tengah”.¹⁶

Penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material dari pada peraturan hukum itu tidak sama apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari – hari dituntut oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah seratus persen. Sebaliknya suatu penetapan yang tidak turuti di dalam kehidupan

¹⁵ Hilman Hadikusumo, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Adat*. Op,cit, Jakarta halaman 36.

¹⁶ Soehardy, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung 1982, halaman 16.

sehari – hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materialnya adalah nihil.

Tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan adat adalah tergantung dari faktor - faktor sebagai berikut :

- a. Lebih atau kurang banyak (*frequente*) penetapan – penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan – penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial di masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adatn yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras itu dengan syarat – syarat kemanusiaan.¹⁷

B. Hukum Perkawinan Adat

B.1 Tinjauan Umum Perkawinan Adat

Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁸

Sedangkan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹⁷ Soebakti Poesponoto, *Asas – asas dan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha Jakarta 1985.

¹⁸ R. Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Sumur Bandung 1981, halaman 7

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Dalam rumusan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selain tercantum tentang pengertian juga tercantum tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau untuk selama – lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Jadi jelaslah bahwa dari rumusan pengertian perkawinan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memberkan keturunan.

Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubunga yang sangat berbeda – beda. Sehingga Hilman Hadkusuma mengartikan hukum perkawinan adat adalah sebagai berikut :

Aturan hukum yang menunjukkan bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat – akibat hukumnya. Di dalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, sistem dan bentuk perkawinan, tentang harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan serta akibat hukumnya jika terjadi putus perkawinan, misalnya jika terjadi perceraian maka bagaimana dengan harta bawaan dan harta pencaharian yang di dapat selama perkawinan.²⁰

Di dalam masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kemasyarakatan dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu terus keatas ke ibu dari ibu dan seterusnya sehingga berakhir pada suatu kepercayaan ada

¹⁹ Ridwan Syah Roni, *Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Melton Patro Jakarta 1986, halaman 12.

²⁰ Hailman Hadikusuma, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung 1980, halaman 141

seorang ibu asal. Jadi di Minangkabau yang berkuasa dilapangan sosial yang penting – penting yaitu dilapangan hak milik dan soal – soal keluarga adalah senantiasa ibu, wanita atau laki – laki dari pihak ibu umpamanya penghulu Andika ; jadi yang mempunyai atau memiliki segenap harta ialah ibu dan dikuasai oleh ibu dan di dalam sebuah rumah kita hanya menemui seorang ibu, wanita – wanita tua atau anak – anak yang masih kecil.

Menurut Hazairi, ia mengajarkan bahwa di Minangkabau ada tiga bentuk perkawinan yang berharap satu sama lain yaitu :

1. Kawin Bertandang

Bentuk kawin bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata – mata orang yang datang bertamu “datang malam. Hilang pagi asalnya” ia berstatus “tamu” pada keadaan dan lingkungan istrinya ia tidak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta, benda milik istrinya dan bersangkutpaut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun ia bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya beserta anak – anaknya.

2. Kawin Menetap

Merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan keadaan adalah kalau rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas inisiatif istri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat exsogami semenda tadi, namun secara fisik di dalam suasana baru, lebih bebas. Lebih intim apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri, dan suaminya telah lebih banyak berada ditengah – tengah anak istrinya, maka lambat laun menetaplah ia, menolong istrinya bila sempat dan mampu.

3. Kawin Bebas

Tahap perkawinan berikut sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu, disebut kawin bebas ; kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.²¹

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, pradnya Paramitha Jakarta 1985, halaman 12

Di dalam sejarah kehidupan manusia selalu mengalami peristiwa – peristiwa penting yaitu : lahir, hidup dalam arti tumbuh dan berkembang dan kemudian pada akhirnya manusia akan kembali kepada-Nya. Dan salah satu kejadian penting dalam perjalanan hidup manusia adalah kawin atau perkawinan, walaupun tidak semua orang melakukannya, hal ini selain merupakan kebutuhan naluri juga untuk meneruskan keturunan dan untuk tetap dapat memelihara adat istiadat yang merupakan warisan turun – temurun, olah karena itu tidak mengherankan apabila banyak segi perkawinan menimbulkan suatu persoalan hukum tersendiri apabila terjadi perceraian yang akhirnya dalam masalah – masalah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau pencaharian.

C. Hukum Keluarga

C.1. Pengertian Hukum Keluarga Adat

Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – anak, dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek – nenek, anak – kemenakan, kebibikan, kemertuanya, keiparan, dan kebebasan. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan kekeluargaan, yang tata hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakat masing – masing.

Hal demikian dijelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa :

“Kaidah atau perilaku hukum dimaksudkan tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan

kekerabatan, hubungan suami – istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak.”²²

Jadi hukum kekerabatan atau kekeluargaan adalah aturan – aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam ikatan kereabatan. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam kutipannya dari Djoedigoeno mendefinisikan bahwa : “Kekeluargaan adalah ketunggalan luhur artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain”.²³

Dengan adanya suatu hubungan dari suatu keturunan, maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak – hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan lain – lain.

Sebagaimana kita mengetahui di dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan – persekutuan, ada persekutuan dimana mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat yang berdasarkan keturunan satu nenek moyang. Ada juga persekutuan – persekutuan yang tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan tetapi berdasarkan daerah, wilayah yang didiami. Ada juga persekutuan – persekutuan

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media Jakarta 1987, halaman 3.

²³ Soerojo Wigjodiponegoro, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung Jakarta 108

yang diambil dari keduanya yaitu selain karena adanya hubungan kekeluargaan juga dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Persekutuan – persekutuan demikian dimaksudkan untuk dapat mempuyai warga yang teraur tetap dan mempuyai tujuan agar memiliki harta baik material maupun immaterialnya sendiri. Persekutuan ini dapat disebutkan dengan persekutuan hukum.

Ada penjelasan dari Soekanto tentang hubungan – hubungan di dalam suatu persekutuan yaitu ;

“Bahwa di dalam masyarakat Indonesia, dahulu dan sekarang terdapat ” :

1. Persekutuan – persekutuan hukum, dimana mempuyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (**genealogische faktor**) adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan persekutuan hukum **Geneologis (Genealogische Rechts gemeenschap)**.
2. Persekutuan – persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (**grandgebied**) yang tertentu dimana faktor territorial (**terrioriele faktor**), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut persekutuan hukum territorial (**Territoriale Rechtsgemeenschap**).
3. Persekutuan – persekutuan hukum, dimana baik faktor geneologis maupun faktor territorial mempuyai tem[pat yang berarti. Persekutuan hukum seperti ini disebut dengan persekutuan hukum Geneologis Teritorial (**Geneologisch Territoriale Rechts gemeenschap**).²⁴

Untuk daerah Minangkabau lebih banyak menggunakan persekutuan geneologis dan territorial maka oleh karena itu lah gabungan dari kedua unsur pengikat tersebut, unsur territorial dan unsur geneologis kita dapati sebagai unsur pengikat persekutuan hukum di Minangkabau (Nagari)

²⁴ Soekanto, *Meninjau hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta 1954, halaman 60.

C.2. Sistem Keturunan

Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah :

Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.²⁵

Keturunan dapat dilihat dari dua sifat yaitu :

1. "Lurus : dimana seorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang pihak.
2. Menyimpang atau bercabang : dimana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam satu ketunggalan luhur.

I.G.N Sugangga, dalam diktatnya hukum adat khusus, mengemukakan bahwa : "Ada tiga macam dasar sistem keturunan atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wilayah Indonesia ini, yaitu " :

- 1 Pertalian darah menurut garis ibu (Marilineal)
Masyarakat bersistem ini menganggap anggota – anggota menarik garis ke atas yang menarik melalui garis ibu, garis ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
- 2 Pertalian darah menurut garis bapak (Patrilineal)
Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota – anggotanya, menarik garis ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki – laki sebagai moyangnya.
- 3 Pertalian darah garis ibu dan bapak (Parental/Bilateral)
Dimana anggota masyarakat hukum adat ini menarik garis keturunan melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki – laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.²⁶

Pada dasarnya suatu hubungan kekeluargaan akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang

²⁵ Bushar Muhammad, *Pokok – pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha Jakarta, cet ketujuh 2000, halaman 3.

²⁶ I.G.N Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang 1988, halaman 1.

biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat – akibat dari suatu hubungan hukum yang didasarkan karena hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah tidak semua sama.

Dalam struktur masyarakat Minangkabau dimana anggota masyarakatnya tersebut menarik garis keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak – anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

C.3. Hubungan Hukum Antara Anak dan Orang Tua

Seorang anak selalu dipandang sebagai penerus suatu generasi, dan pada dasarnya juga dilihat sebagai wadah dimana semua harapan – harapan dari suatu keluarga besar khususnya orang tua anak tersebut yang mana kelak kemudian hari akan dilimpahkan. Anak juga bagi orang tua diharapkan dapat menjadi pelindung bagi orang tua di dalam menjalani sisa – sisa hidupnya terlebih jika keadaan orang tua secara fisik sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah sendiri.

Sejauhmana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang mana menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi susunan kekerabatan, sistem pertalian daerahnya, perkawinan, dan bentuk perkawinan dari ayah – ibunya dan ada tidaknya pertalian adat diantara

anak dan orang tua. Menurut Hilman Hadikusuma, hal yang demikian dianggap sebagai berikut :

1. Hukum susunan kekerabatan yang Patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan istri masuk ke dalam kerabat suaminya. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki – laki. Anak laki – laki adalah penerus keturunan baik yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.
2. Dalam susunan kerabatan yang Matrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami berada dibawah pengaruh kerabat istri. Anak – anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak – anak pria seolah – olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.
3. Sedangkan dalam susunan kekerabatan yang Parental maka sistem pertalian darah tidak berbeda dengan sistem keturunan ayah dan keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan bebas, dimana setelah perkawinan suami – istri hidup mandiri. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan dapat berlaku pengangkatan anak pria atau wanita.²⁷

C.4. Hubungan Hukum Anak dengan Sanak Keluarga

Hubungan anak dan sanak keluarga atau kekerabatannya terjadi dikarenakan ayah dan ibu si anak mempunyai hubungan kekeluargaannya. Jika si ayah atau ibu tidak mempunyai kerabat atau menjauhi hubungan kekerabatan antara anak dan kekerabatan, maka dengan sendirinya hubungan kerabatan antara anak dan kerabat orang tuanya tidak ada. Terjadi hubungan kekerabatan ini adalah disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan, atau juga pertalian adat.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hubungan anak dan sanak keluarga dapat dilihat dalam sistem sebagai berikut :

²⁷ Hilma Hadikusuma, *Hukum Kerabatan Adat*, Sarana Media Jakarta 1987, halaman 33.

1. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak/ibu maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan sanak keluarganya dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekerabatan yang Bilateral demikian ini, maka masalah – masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan hubungan – hubungan hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama kuat.
2. Dalam persekutuan yang sifatnya Matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jatuh dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak.
3. Dalam persekutuan yang sifatnya Patrilineal hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak adalah jauh lebih erat dan jauh lebih penting (kebalikan dari sistem Matrilineal).²⁸

D. Hukum Waris Adat

D.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Di dalam sejarah kehidupan manusia selalu mengalami peristiwa – peristiwa penting yaitu : lahir, hidup dalam arti tumbuh dan berkembang dan kemudian pada akhirnya manusia akan kembali kepada-Nya. Dan salah satu kejadian penting dalam perjalanan hidup manusia adalah kawin, walaupun tidak semua orang melakukannya hal ini selain merupakan kebutuhan naluri juga untuk meneruskan keturunan dan untuk tetap dapat memelihara adat istiadat yang merupakan keturunan dan untuk tetap memelihara adat istiadat yang merupakan warisan turun – temurun, oleh karena itu tidak mengherankan apabila banyak segi perkawinan menimbulkan persoalan hukum tersendiri apabila terjadi perceraian yang akhirnya pada masalah – masalah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau pencaharian.

Untuk mengetahui apakah hukum waris adat itu, pertama – tama marilah kita ikuti dahulu apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat dibawah ini :

²⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, cet ketujuh Jakarta 2000, halaman 10.

1. Soepomo

Dalam bukum beliau yang berjudul “Bab – Bab Tentang Hukum Adat” dikatakan “Hukum adat mengenai warisan, dimana dengan kata lain waris itu menurut beliau, adalah peraturan – peraturan yang mengatur proses – proses penerusan serta pengoperan barang – barang trak berwujud bhenda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.²⁹

Selanjutnya dikatakan oleh beliau, proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia, proses itu berjalan terus hingga angkatan (*generasi*) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak – anak yang merupakan keluarga – keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan material sendiri dengan barang – barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamental.

2. Iman Sudiyat

Hukum waris adat meliputi aturan – aturan dan keputusan – keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan metril dan non materil dari generasi ke generasi.

Pengaruh aturan – aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut³⁰:

- a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
- b. Transaksi – transaksi seperti jual gadaai harus dilanjutkan oleh pada ahli waris.

Dari pendapat – pendapat para ahli hukum adat tersebut diatas serta unsur – unsur hukum waris adat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah “keseluruhan aturan hukum atau petunjuk – petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun pengoperan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal”

²⁹ Bushar Muhammad, *Pokok – pokok Hukum Adat*, Pradnya paramitha, Jakarta 1981, halaman 39.

³⁰ IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro Semarang 1995, halaman 7

D.2. Asas – Asas Hukum Waris Adat

Hukum adat waris meliputi norma – norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteril maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihan. Walaupun hukum adat itu mencerminkan keanekaragaman hukum, tak jarang ada perbedaan yang mendasar antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain, tetapi pada dasarnya asas – asas hukum adat mempunyai nilai – nilai yang universal hal ini dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipuro, yang menyebutkan nilai – nilai universal antara lain :

1. Gotong royong
2. Fungsi sosial
3. Asas persetujuan
4. Asas perkawinan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintah.³¹

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha untuk bekerja bersama dalam membangun dan memelihara.

Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama seperti asas gotong royong, sedangkan fungsi sosial milik tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya sedesanya pada waktu – waktu tertentu dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana sudah menjadi kebiasaan kepada desa dalam mengambil keputusan – keputusan penting selalu mengadakan musyawarah di Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

³¹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*, Gunung Agung Jakarta 1984, halaman 59

Asas perwalian dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penuangannya dalam kehidupan sehari – hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud diatas.

Jarang kita lihat sengketa – sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (waris) dibawa ke tingkat Pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak sedap kalau sampai pada perselisihan antar sesama keluarga hanya karena gara – gara soal warisan menurut Hilman Hadikusuma, dasar – dasar pembagian warisan berlaku asas – asas sebagai berikut :

1. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
Adalah hak untuk diberlakukan sama oleh orang tua dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan. Menurut hukum adat tradisional Jawa, maka pada dasarnya semua anak, baik laki – laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.
2. Asas kerukunan dan kekeluargaan
Dimana pewaris itu didasarkan atas suatu pendekatan yang erat kaitannya dengan kesatuan dalam keluarga dan sangat tidak diharapkan jika suatu warisan akan merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan. Apabila harta peninggalan dibagi – bagi antara para pewaris maka pembagian itu biasanya berjalan rukun, di dalam suasana ramah tamah, dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap – tiap waris. Di dalam menjalankan kerukunan itu, orang – orang sama mengetahui hak – haknya masing – masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga, seberapa jauh pembagian harta peninggalan itu menyimpang dari peraturan – peraturan hukum.
3. Asas musyawarah dan mufakat
Kelanjutan asas nomor dua agar pembagian itu tetap memperhatikan kerukunan dan selalu berpegang teguh kepada sifat yang berkekeluargaan maka pewarisan adatselalu didasarkan dengan adanya musyawarah dan mufakat dalam pembagian maupun sengketa yang muncul.
4. Asas keadilan dan parimirma
Di dalam suatu keluarga adat sangat ditekankan pada sistem keadilan dan hal ini aka mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang

mana akan memperkecil peluang merusaknya hubungan dari keluarga tersebut.³²

D.3. Sistem Kewarisan

Sebelum diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris, maka kita harus meninjau kembali hal – hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan yaitu dengan sistem kekeluargaannya sampai ke sistem perkawinannya.

Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap peraturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, hal ini dijelaskan oleh Eman Suparman, yaitu :

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris secara perorangan, misalnya : Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain – lain.
2. Sistem kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama – sama (kolektif), sebab harta yang diwaris itu tidak dapat dibagi – bagi kepemilikannya kepada masing – masing ahli waris, contohnya : “Harta Pusaka di Minangkabau” dan “Tanah Dati di Semenanjung Hitu Ambon”.
3. Sistem kewarisan Mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu :
 - a. Mayorat laki – laki, yaitu apabila anak laki – laki tertua/sulung atau keturunannya laki – laki merupakan pewaris, misalnya di Lampung
 - b. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat tanah Sumendo di Sumatera Selatan.³³

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, op,cit, halaman 31

³³ Ibid halaman 79.

D.4. Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi – bagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Harta warisan dapat terdiri dari yaitu :

1. Harta yang tidak dapat dibagi – bagikan penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli warisnya.
2. Harta yang dapat dibagi – bagikan kepada seluruh ahli warisnya.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi – bagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan dipakai. Menurut hukum adat yang dimaksud harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ditinggalkannya pada waktu pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi dengan biaya penguburan, biaya selamatan, hutang – hutang, hutang keagamaan.

Proses pemindahan harta warisan ini telah dimulai pada waktu pewaris masih hidup yaitu dengan jalan pemberian – pemberian hibah oleh pewaris kepada mereka yang sedianya mewaris. Pemberian – pemberian hibah diperhitungkan sebagai bagian pewarisan bila jumlahnya dibandingkan ahli waris adalah seimbang.

Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota – anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisahkan dengan rumah tangga asalnya.

Menurut Otje Salman menjelaskan :

“Bahwa prose pengalihan harta perkawinan terhadap anak – anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak. Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak – anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan”³⁴

Proses pewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Adakalanya seorang pewaris diharapkan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (Wakasan/Welingan – Jawa : Umadat - Minangkabau).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa : “Pewarisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal”.³⁵

Tujuan pewarisan yang demikian adalah :

- a. Para ahli waris membagi harta warisan secara layak.
- b. Untuk menjaga kerukunan diantara para ahli waris.
- c. Dengan hibah pewaris menyatakan secara mengikat sifat – sifat dari barang – barang harta yang ditinggalkan seperti barang pusaka, barang – barang dengan hakgadai atau barang – barang yang disewa dan lain sebagainya.

Harta warisan dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya terdiri dari :

³⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap hukum Waris*, Alumni Bandung 1993, halaman 58.

³⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta 1983, halaman 297.

1. Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi yang biasanya dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat yang dipimpin oleh penghulu andika.

2. Harta pusaka rendah

Yaitu harta yang turun dari satu generasi biasanya dikuasai oleh keluarga yang paling kecil yang terdiri atas istri dengan anak – anaknya atau suami dengan saudara – saudaranya sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.

3. Harta pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko.

4. Harta Suarang

Yaitu harta benda yang diperoleh secara bersama – sama oleh suami – istri selama masa perkawinan. Tidak termasuk harta suarang ini, yakni harta bawaan suami atau harta pusaka istri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung.

D.5. Ahli Waris

Penerusan dan pemindahan harta warisan seseorang atau berjalan satu generasi manusia kepada generasi yang menyusulnya, baik mereka itu keturunan penerus maupun bukan, biasanya dengan menggunakan dua garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok pengganti

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan – urutan keutamaan diantara golongan – golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, keutamaan tadi, maka orang – orang yang mempunyai hubungan darah dibagi menjadi golongan – golongan sebagai berikut :

- a. Kelompok keutamaan I : Keturunan waris
- b. Kelompok keutamaan II : Orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang – orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, yang sungguh – sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubungan dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.

Dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh masyarakat tertentu (Partilineal, Matrilineal, Parental).

Pada masyarakat Minangkabau khususnya, ahli waris dapat dibedakan antara lain :

1. Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri waris setampok (waris setampok), waris sejangka (waris sejangkal), dan waris saheto (waris

sehasta). Masing – masing ahli waris yang termasuk ahli waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran artinya selama waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejangkal belum berhak mewaris. Dekimikian pula ahli waris seterusnya selama ahli waris sejangkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.

2. Waris bertali adat

Yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat.

Sedangkan hak mewaris dari masing – masing ahli waris yang disebutkan diatas satu sama lain berbeda – beda tergantung pola jenis peninggalan yang akan diwarisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya hal ini terlihat di dalam paparan di bawah ini :

1. Harta pusaka tinggi, dikuasai oleh keluarga yang besar atau kerabat yang dipimpin oleh penghulu andika.
2. Harta pusaka rendah, dikuasi oleh keluarga yang paling kecil, yang terdiri atas istri dengan anak – anaknya atau suami dengan saudara – saudaranya sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.
3. Harta pencaharian, yang berhak mewaris adalah waris nan dakeh (ahli waris nan dekat) yang terdiri dari anak – anak, saudara – saudaranya (sekandung) kemudian cucu – cucunya dan keturunan selanjutnya.
4. Harta suarang, ahli warisnya adalah :

- a. Suami – istri bercerai dan tidak punya anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami – istri
- b. Bila salah seorang meninggal dunia (suami dan istri) dan tidak punya anak maka, pembagiannya sebagai berikut :
 - Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak.
 - Jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

D.6. Perubahan hukum Waris Adat

Hukum adat yang sebagian besar terdiri dari peraturan – peraturan hukum yang tidak tertulis, mempunyai sifat dinamis, artinya mudah berubah, berkembang, sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, perubahan dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan – peraturan itu dengan yang lain secara tiba – tiba, tetapi secara demikian rupa sehingga tidak akan menjadikan ketidaktentraman maupun kegoncangan dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan perubahan itu terjadi karena hukum adat senantiasa memperhatikan situasi dan waktu, serta perkembangan jaman. Itulah keistimewaan sifat yang dimiliki oleh hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tugas utamanya adalah dapat mengayomi serta memberikan keadilan yang sebenar – benarnya pada masyarakat. Masyarakat adalah hidup, selalu bergerak berhubungan dengan itu rasa keadilan rakyat beragerak pula. Demikian pula halnya dengan hukum waris adat, banyak hal yang harus

dikembangkan dan mendapat perubahan untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman yang bergerak maju serta modern sekarang ini, baik yang berkembang secara Nasional maupun Internasional. Sekarang ini kita ingin segera mensejajarkan Negara kita setaraf dengan negara – negara maju lainnya di dunia ini. Kita sekarang membutuhkan hukum waris yang modern, serta bersih dari diskriminasi terhadap wanita, dan yang mencerminkan kelima sila dari Pancasila.

Pandangan bahwa hukum adat juga mengalami perubahan pada dasarnya bukan pandangan baru. Van Vollenhoven dalam *Orientasi Inhet Adat Recht Van Nederlandsch Indie* (orientasi hukum adat Indonesia) telah berbicara banyak tentang hal ini dinyatakan bahwa : “Hukum adat bukanlah sebagaimana sering dianggap oleh orang – orang Eropa, sesuatu yang tidak berubah – ubah, sekalipun kebanyakan perubahan memang tidak tampak dalam jangka waktu observasi oleh seorang pengamat. Sebaliknya, berbagai pihak menyatakan bahwa ”Adat kebiasaan negeri perlahan – lahan bergeser kearah kebutuhan – kebutuhan yang telah berubah, bahwa adat bertukar dengan bergantinya dengan generasi – generasi dan menurut kenyataannya sekejappun tidak mandek bahwa akan terus berjalannya waktu dan pertemuan dengan bangsa – bangsa tetangga membawa perubahan – perubahan besar terhadap hukum adat, bahwa betapapun tidak tampaknya sifat hukum adat itu, namun hukum tersebut sebetulnya mengarahkan dini kepada keadaan yang telah berubah : walaupun setapak demi setapak dan karenanya sangat perlahan – lahan sehingga hamper – hamper luput dari pengamatan dan hanya dapat kelihatan menyolok bila ada kesempatan untuk melihat keadaan pada misalnya se abad yang lalu dan bahwa dengan demikian

salahlah pendapat untuk mengira, bahwa adat Bumi Putera adalah suatu keseluruhan yang tidak berubah – ubah yang tidak tunduk pada hukum sejarah, karena itu orang pribumi yang terdidik sadar akan perubahan perlahan – lahan dari pada adat : dikalanga orang Minangkabau menurut pemberian *Van Ophuysen* terdengar pepatah adat (pepatah) yang berbunyi : sekali air gadang, sekali tapian beranjak, sekali traja beganti, sekali adat berubah, yaitu sekali air membanjir, sekali tempat mandi bergerak – gerak raja berganti, sekali adat berubah.³⁶

Demikian pula dengan hukum waris adat juga mengalami perubahan, dalam hal ini pada masyarakat Minangkabau yang sifat kekeluargaannya matrillienal yaitu menarik garis kekeluargaannya hanya dari ibu, dimana seorang ayah berada di luar keluarga ibu dan anak. Di Minangkabau seorang ibu memberikan warisan kepada anak wanitanya, sedangkan di daerah Semendo ayah – ibu mewariskan hanya pada anak – anak wanitanya. Tapi pada saat ini ketentuan adat waris seperti yang diuraikan diatas itu sudah berubah, terutama dikalangan keluarga – keluarga Minangkabau yang merantau diluar daerah aslinya.

Tetapi juga di daerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan jaman ini nampak sangat jelas adanya pergeseran yang makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi somah di dalam masyarakat, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami – istri – anak lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat dari pada ikatan hubungan kekeluargaan famili.

Dan dengan lebih eratnya katan kekeluargaan somah (suami – istri – anak) ini, maka akan kemungkinan anak – anak menjadi ahli waris dari pada

³⁶ Soleman B Tanaka, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Djambatan Jakarta 1986, halaman 98

bapaknya menggantikan saudara – saudara kandung bapaknya kiranya tidak bisa ditahan lagi.

Menurut M. Rashyid Ariman ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan dalam hukum waris adat yaitu :

1. Faktor pendidikan

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya, jadi lebih banyak memakai lagi perhitungan, mempertimbangan segi – segi negatif dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak sehingga berkurang sifat berpikir spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal ini berpengaruh khusus dalam waris adat.

2. Faktor perantauan/Imigrasi

Adanya perpindahan penduduk atau orang dari daerah terpencil ketempat – tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari di daerah asalnya (kampong halaman), serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di daerah perantau pengaruh bagi hukum waris misalnya : daerah asal hukum waris misalnya : di daerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem Parental maka ia cenderung mengikuti sistem di daerah perantau yaitu hukum waris berdasarkan sistem Matrilineal.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas termasuk pula didalamnya faktor industrialisasi. Pada hakekatnya erat pula hubungannya dengan perkembangan lapangan teknologi dan perkembangan dikota – kota besar semua menunjukkan dan membawa perubahan di dalam masyarakat menuju kepada suatu susunan ekonomi yang meliputi gandakan hasil produksi disegala lapangan. Semuanya mempengaruhi tata hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

4. Faktor revolusi dan perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, yang membawa akibat perubahan kepada cara – cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas, dan lain – lain. Lebih – lebih membawa perubahan dalam hidup mental dan rohani, sehingga kemudian timbul bersamaan derajat antara laki – laki dan perempuan (Bilateral).

5. Faktor yurisprudensi

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan

damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota Almarhum pewaris. Harapannya adalah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah tersebut dalam lingkup lingkungan anggota keluarga sendiri atau kerabat dan apabila perlu dalam musyawarah perdamaian adat, yang disaksikan oleh tua – tua adat. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai dimuka keluarga kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan maka barulah kemudian persoalannya dilimpahkan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, maka hal ini menjadi tugas bagi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencari solusi yang tepat bagi sengketa waris adat tersebut. Kemudian timbullah yurisprudensi, sebagai solusi dari sengketa - sengketa waris adat tersebut.³⁷

³⁷ M. Rashyod Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, halaman 24

Menurut Imam Sudiyat, bahwa aturan – aturan hukum waris mengalami pengaruh yaitu :

1. Perubahan / perkembangan sosial
2. Karena makin eratnya ikatan keluarga sejalan dengan melonggarkannya ikatan clan dan suku.
3. Aturan – aturan pewarisan dari stelsel-stelsel hukum asing yang karena hubungan tertentu dengan agama mendapat kewibawaan yang berasal dari religi ; aturan – aturan itu misalnya oleh Hakim – hakim Agama diterapkan atas peristiwa – peristiwa konkrit, meskipun pengaruh itu di dalam hukum waris lebih kecil dari pada di dalam hukum perkawinan, tergantung kepada kekuatan hukum waris struktural apakah hukum tersebut dapat bertahan ataukah akan terjadi perubahan yang mendalam.³⁸

³⁸ Imam Sudiyat, *Asas – asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta 1978, halaman 152

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani "Methodos" yang artinya adalah "cara" atau "jalan". Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja. Yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁹

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam membuat karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat pula, yaitu suatu metode-metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metodologi yang diterapkan dalam setiap penelitian suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya.

Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :
" Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris". Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁴⁰

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali Jakarta 1983

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta 1990, halaman 9.

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder.

Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai hukum *in book*, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata didalam masyarakat.

b. Spesifik Penelitian

Spesifik penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat Minangkabau di kota Semarang, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di kota Semarang, khususnya masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang, disamping itu perkumpulan-perkumpulan organisasi masyarakat perantau di Semarang.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah berupa data yang langsung didapat dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) lapangan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang serta perkumpulan organisasi masyarakat Minangkabau di Semarang.
- Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya.

Dalam bukunya tentang metode penelitian hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas dua bagian yaitu ;

Data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Norma Dasar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan-peraturan perundangan sebagai peraturan organiknya.

Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tertier berupa : Bibliografi dan Indeks Komulatif.⁴¹

e. Penetapan Populasi dan Sampel

e.1. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subyek penelitian yang nantinya akan dikenal generalisasinya.⁴²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang.

e.2. Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti.

Dalam penulisan ini penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar. Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

Penggunaan tehnik Purposive Sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karekteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.⁴³

Adapun yang menjadi perkumpulan masyarakat Minangkabau di kota Semarang

⁴¹ Ibid, halaman 525.

⁴² IB Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, Surabaya 1976, halaman 10.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta 1989, halaman 58.

1. Ketua dan anggota paguyuban atau perkumpulan masyarakat Minangkabau di kota Semarang.
2. Masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

e.3. Responden

Mengenai responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau perantau yang ada di Semarang khususnya yang pernah mengalami pewarisan.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

f.1. Teknik Pengumpulan Data

f.1.1. Informasi penelitian

Pada dasarnya penelitian ini terlebih dahulu akan ditentukan siapa yang akan menjadi informasi kunci (Key Informan) yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai hukum adat Minangkabau khususnya mengenai sistem kekeluargaan dan sistem pewarisannya. Bertolak dari informasi kunci ini maka secara snow bolling akan dilakukan pengalihan data pada informasi-informasi lainnya sehingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan menunjuk keterangan dari suatu informasi kunci dipergunakan untuk melacak informasi lainnya guna melengkapi data yang diperlukan. Informasi adalah orang diharapkan dapat memberi informasi atau keterangan dalam penelitian lapangan. Informasi yang dipilih dalam

penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau perantau yang ada di Semarang, khususnya yang pernah mengalami pembagian warisan.

f.1.2. Wawancara dan Interview

Dalam memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara atau interview yang didapat, wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini, yaitu :

1. Ketua dan anggota paguyuban atau perkumpulan masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang.
2. masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang, khususnya yang pernah mengalami pewarisan.
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Pelaksanaan wawancara menggunakan sistem wawancara tak terstruktur. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maksud dari wawancara tak terstruktur adalah responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas, dimana responden memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexi J Moleong, wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan keadaan sebagai berikut :

1. Bila wawancara berhubungan dengan orang penting.
2. Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara mendalam lagi pada seorang subyek tertentu.
3. Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan.
4. Jika ia terakhir untuk memperoleh bagian-bagian tertentu yang tak normal.
5. Apabila ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden.
6. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi atau keadaan tertentu.⁴⁴

f.1.3. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, cara-cara yang dipakai untuk pengumpulan data dari hasil wawancara pada orang-orang yang masuk kedalam sampling dan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut, maka penulis menggunakan Teknik Triangulasi, yaitu Suatu teknik dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data penulis memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan yang dipakai sebagai pembandingan dari data yang diperoleh.

Menurut Lexy J Moleong, menyatakan”bahwa Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2001, halaman 138.

lainnya, Denzin (1978) membedakan empat macam pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode penyidikan, dan teori.⁴⁵

Dalam penulisan ini, penulis menerapkan sistem pemeriksaan keabsahan data melalui sumber, yaitu dengan jalan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Disini yang di perbandingkan adalah :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Data hasil pengamatan adalah data yang diperoleh pada saat penelitian baik itu data yang telah ada maupun data yang diperoleh langsung dilihat dalam perkembangan masyarakat Minangkabau perantau yang mana kemudian diperbandingkan dengan wawancara dari pihak-pihak yang merupakan sampling dalam penulisan ini.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yaitu pendapat dan pandangan dari masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, disini perbandingan dilakukan atas wawancara oleh penulis kepada pihak-pihak yang dijadikan sampling dengan data-data dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

⁴⁵ Ibid, halaman 178

f.2. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dilakukan dengan jalan dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu :

1. Reduksi data.
2. Display data.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hal ini diperjelas oleh Nasution S yang mengemukakan bahwa :

“Reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Display data adalah data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatlah matriksnya, grafik, network, dan charts, agar data dapat dikuasai”. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul dan telah direduksi dan di display, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul, hypotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.⁴⁶

G. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, kualitatif artinya menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan. Sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis. Maka untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, kemudian dibuat acuan dasar yang berupa proses pelaksanaan untuk menganalisa data, yaitu dengan metode :

⁴⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1992, halaman 129.

- a. Analisis domein yakni untuk memperoleh suatu pengertian yang sifatnya umum dan relatif tentang keseluruhan dalam suatu pokok permasalahan yang telah diteliti.
- b. Analisis taksonomis ini merupakan analisis yang lebih rinci dan mendalam, pada analisis ini fokus dari suatu penelitian ditetapkan berdasarkan pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran dari penelitian.

c. Analisis kompanensial

Dalam analisis ini yang dilihat dalam kontras antar elemen yang terlihat dalam domein, yang mana hal itu diperoleh melalui observasi atau wawancara dan interview dari pihak yang terpilih.

d. Analisis temakultural

Analisis tema, merupakan suatu proses guna menemukan tema-tema yang keberadaannya termanifestasi atau menjelma secara luas dalam kawasan keseluruhan atau sejumlah domein yang mana akan memunculkan suatu hubungan yang mengintegrasikan lintas domein yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1.1 Sejarah Berdirinya Ikatan Keluarga Minangkabau Di

Semarang (IKMS)

Orang Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang suka merantau dengan tujuan untuk mencari penghasilan atau bekerja baik sebagai pejabat Pemerintah, Pegawai Swasta, maupun bekerja sebagai Wiraswasta misalnya berdagang membuka rumah makan padang dan sebagainya. Karena dilatar belakangi persekutuan genealogis territorial maka masyarakat Minangkabau perantau berorientasi didalam kehidupan kesehariannya selalu berhubungan satu dengan yang lain walaupun diluar kampungnya, mereka tetap membentuk suatu perkumpulan kekeluargaan baik dalam suatu perkumpulan yang dipautkan karena satu keturunan dalam satu silsilah kekeluargaan, tetapi juga membuat suatu keterkaitan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Begitu juga di Semarang mereka membentuk ikatan keluarga di Semarang. Menurut Bapak Masril Sofyan.⁴⁷ Ikatan keluarga Minang ini pada mulanya perkumpulan biasa, sebagai masyarakat perantauan kemudian semakin banyak orang Minangkabau di Semarang, maka pada tahun 1981 dibentuklah ikatan keluarga Minang Semarang (IKMS), pada waktu itu keanggotaannya baru

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang, Pada Tanggal 1 Mei 2003.

berjumlah lima puluh orang (50 orang) dan sampai sekarang berjumlah mencapai seratus dua puluh lima orang (125 orang).

Ikatan Keluarga Minang Semarang (IKMS) mempunyai tempat kedudukan di jalan Pamularsih Buntu No. 14 Semarang sebagai suatu organisasi maka mempunyai susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut :

1. Ketua : Bapak Marsil Sofyan, SH
2. Wakil Ketua : Bapak Agus Miftah, SH
3. Bendahara : Ibu Nuraminah, SE
4. Sekretaris : Ibu Nunung, Spd
5. Humas : Bapak Kuncoro, SH
6. Anggota : yang sekarang berjumlah 125 orang.⁴⁸

Masing-masing elemen organisasi tersebut, mempunyai tugas-tugas yang sangat penting bagi kelancaran atau operasional ikatan ini. Misalnya ketua disamping ia sebagai pimpinan maka ia mempunyai tugas pelindung anggotanya. Wakil ketua bertugas mewakili ketua apabila ada halangan atau keperluan maka ia bisa menentukan kebijakan yang dipandang baik bagi ikatan tersebut.

Sebagai Bendahara maka ia bertugas memanage keuangan organisasi dan juga dibantu oleh sekretaris, dimana organisasi ini memberikan bantuan kredit bagi anggota apabila ia membutuhkan dana untuk usaha. Sedangkan sumber dana tersebut berasal dari simpanan anggota secara sukarela, simpanan tersebut diberikan setiap minggu bersamaan dengan acara rutin yaitu arisan secara bergiliran di rumah anggota-anggotanya.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Miftah, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang, Pada Tanggal 5 Mei 2003.

Sedangkan Humas biasanya dipilih orang yang sudah lama menetap di Semarang sehingga ia benar-benar mengerti adat istiadat setempat, tugas seorang humas adalah memberikan sosialisasi terhadap adat istiadat setempat bagi masyarakat Minangkabau pendatang baru disamping itu ia juga sebagai pemberi informasi bagi masyarakat Minangkabau pendatang baik informasi masalah usaha, pendidikan, dan sampai hal-hal yang kecil misalnya tempat kos atau kontrakan bagi pendatang yang mau tinggal di Semarang.

Setiap ikatan organisasi pasti mempunyai maksud dan tujuan, begitu juga dengan dibentuknya ikatan keluarga Minang di Semarang yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. membina persaudaraan dan silaturrohmi antara mereka (masyarakat Minangkabau perantau) dan juga dengan masyarakat setempat (Semarang).
2. sebagai sarana untuk mempermudah beradaptasi dengan daerah yang didatanginya.
3. sebagai sarana bertukar informasi dan bisnis.
4. sebagai tempat persinggahan awal bagi masyarakat Minangkabau yang baru datang di Semarang sebelum mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti.

Disamping maksud dan tujuan tersebut ikatan keluarga Minang Semarang juga mempunyai kegiatan baik dengan masyarakat Minangkabau sendiri maupun dengan masyarakat Semarang. Kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat Minangkabau misalnya arisan yang dilakukan setiap hari minggu yang bertempat di rumah anggota-anggotanya secara bergiliran, selain itu dibidang kerohanian

setiap bulan diadakan pengajian. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat Semarang sebagai rasa kepedulian terhadap anak yatim piatu biasanya mereka mengadakan amal jariah yang diadakan setiap atau bertepatan dengan hari besar Islam dan biasanya dilakukan disekitar sekretariat Ikatan Keluarga Minang Semarang.

A.1.2 KEHIDUPAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI SEMARANG

Didalam tata susunan keluarga Minangkabau yang didasari atas hukum Ibu, kita menjumpai hubungan yang tersendiri antara mamak dengan kamanakan-kamanakannya sehingga timbul tertib bermamak-mamakan.

Bahwa perkawinan menurut Minangkabau tidak memisahkan baik istri maupun suami dari lingkungan Paruiknya. Anak-anak yang didapat dari jurai ibunya, yang jurai tersebut dikepalai oleh seorang mamak, sedangkan sibapak adalah mamak pula didalam Paruiknya. Dapatlah kita anggap bahwa mamak ini adalah seolah-olah bapak dari keluarga Minangkabau (jurai), dan oleh karena semua anak-anaknya dari ibu (serta anak-anak dari saudara-saudara perempuan ibunya) merupakan anggota jurai yang dikepalai oleh mamak tersebut ; maka dapatlah dengan mudah dipahami adanya hubungan tersendiri antara mamak dan kamanakan dan sebaliknya.

Menurut Bapak Masril Sofyan⁴⁹, kehidupan masyarakat Minangkabau di Semarang telah mengalami perubahan dalam kekeluargaan. Pertalian yang begitu erat dalam susunan lingkungan sanak, dewasa ini telah kelihatan kabur, didesak

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang, Pada Tanggal 10 Mei 2003.

oleh kebutuhan hidup yang kian maju, perkembangan jaman yang modern, bertambah banyaknya kehidupan orang Minangkabau bergerak kearah susunan keluarga baru, dimana ayah menjadi pimpinan keluarga, ikatan baik dari istri maupun suami terhadap paruik-paruiknya mereka mulai tampak lepas ; suami-istri tadi telah hidup dengan kekauatan mereka berdua memelihara anak-anaknya, tak banyak lagi suami-istri tadi bergantung kepada jurai atau paruik mereka masing-masing.

Malahan berdasarkan pengamatan Bapak Kuncoro⁵⁰, kehidupan orang-orang Minangkabau yang merantau di Semarang, dimana suami-istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri. Diperantauan Semarang anak-anak telah jauh dari mamak-mamaknya, induak bako telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri.

Anak-anak mereka ini yang tidak pernah atau jarang sekali mengetahui bahwa dikampung mereka masih ada mamak serta bakonya, umumnya tidaklah lagi mengerti suasana menurut susunan adat tersebut, sehingga apabila tiba masanya bagi mereka berumah tangga, mereka membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, seperti keluarga didalam mana mereka dibesarkan.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kuncoro, Warga Minangkabau Di Semarang, Tanggal 12 Mei 2003.

Bahwa menurut Bapak Andi⁵¹, ditempat-tempat yang masih terdapat adanya rumah gadang (rumah keluarga) seperti dapat kita lihat dikampung-kampung diluar kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan lain-lain, dimana siistri masih tinggal di dalam lingkungan jurai atau paruiknya, dimana kamanakan masih dimata-matai oleh mamaknya, disanapun telah tampak terlihat siayah telah mengambil inisiatif memelihara serta menafkahi anak-anak serta istrinya, masing-masing suami-istri telah mempunyai tendensi membentuk keluarga baru.

Dilapangan perkawinan menurut Ibu Nunung⁵², karena masyarakat Minangkabau di Semarang telah membentuk keluarga baru atau susunan baru, yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya, maka konsekuensinyapun telah terlihat pula, oleh karena ditangani kedua pengantin itulah terletak pokok bahtera hidup sesudah perkawinan nantinya, sianak telah tampak mempunyai kebebasan memilih jodoh siapa yang dicintainya untuk menjadi teman hidupnya, sebagai sekutu hidup dalam mendirikan keluarga.

Orang-orang tua Minangkabau perantau termasuk di Semarang dewasa ini telah bersikap lemah terhadap perkawinan anak-anaknya ; mereka telah memperhatikan kebahagiaan anak-anaknya yang akan menikah dari pada persetujuan keseluruhan jurai. Perkembangan ini, tidak hanya mengakibatkan kebebasan sianak memilih jodohnya antara sesama putra dan putri Minangkabau, ada kemungkinan cinta anak gadis Minangkabau jatuh bukan lagi pada putra Minangkabau, tetapi telah berurat berakar didalam hati seorang putra suku bangsa

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi, Warga Minangkabau Di Semarang, Tanggal 20 Mei 2003

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nunung, Sekretaris Ikatan Keluarga Minang Di Semarang, Pada Tanggal 20 Mei 2003.

Indonesia lain (atau lebih luas pada bangsa lain) kalau asas kekeluargaan baru telah di insyaf-sadari, orang tua sigadis tentunya harus melepaskan anaknya mengizinkan meng-concretiseer percintaan mereka menjadi perkawinan, karena didalam kehidupan kedua suami-istri itu nantinya, mereka pada umumnya tidak bergantung lagi kepada ibu-bapaknya.

Bagi orang-orang Minangkabau yang hidup diperantauan Semarang Menurut Bapak Ridwan⁵³, bagi mereka kampung halamannya sudah di negeri orang, dan telah jauh kampung untuk pulang ke Minangkabau, perkawinan campuran tersebut bukan menjadi soal lagi.

Berdasarkan data yang terkumpul diikatan keluarga Minangkabau Semarang menurut Bapak Masril Sofyan⁵⁴, masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, lima puluh persen (50%) adalah wiraswasta yaitu membuka rumah makan padang, empat puluh persen (40%) bekerja di perkantoran baik sebagai pegawai pemerintah maupun diperusahaan swasta dan yang sepuluh persen (10%) kebanyakan adalah pelajar atau mahasiswa.

Bagi anak-anak Minangkabau yang bersekolah diluar Minangkabau khususnya di Semarang, kelak apabila mereka telah selesai dan kembali ke kampung halamannya mereka akan menjadi ahli-ahli yang akan bekerja di masyarakat, yang mempercepat proses spesialisasi didalam lapangan pekerjaan dan akibatnya yang penting bagi mreka ialah bertambah cepat pula modernisasi

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwan, Warga Minangkabau Di Semarang, Tanggal 22 Mei 2003.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Di Semarang, Tanggal 22 Mei 2003.

timbul didalam masyarakat. Mereka juga membawa perubahan didalam lingkungan keluarga masyarakat Minangkabau, hal ini bisa kita maklumi karena mereka terpengaruh adat kebiasaan yang ditempati dulu. Faktor baru yang masuk dilingkungan keluarga Minangkabau tersebut tidaklah merusak susunan lama, hanya sedikit menggeser pelaksanaan isi dari hubungan menurut adat, seolah-olah penggantian kewajiban-kewajiban yang dahulu dilaksanakan oleh mamak, dewasa ini menjadi tanggungannya sibapak ; akan tetapi diluar bidang kebutuhan hidup materiil dari keluarga baru, masih dapat dilihat pengaruh susunan lama.

A.2. Gambaran Umum masyarakat Minangkabau

A.2.1. Susunan Masyarakat Minangkabau

Minangkabau, adalah suatu daerah di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai pada lingkungan hidup yang paling atas, yaitu sebuah "Nagari" kita dapat melihat bahwa faktor "turunan darah menurut garis ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu didalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat yang lain.

Di Minangkabau dijumpai empat buah suku asal, yaitu Koto, Pialang, Bodi, Caniago. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang suku-suku tadi berkembang sampai akhirnya menjadi sejumlah kira-kira empat puluh buah.

Sebagai unsur pokok yang tali pengikat, di Minangkabau kita menjumpai faktor genelogis yang mengikat kesatuan persekutuan hukum itu. Suatu

masyarakat yang hanya diikat oleh faktor geneologis (pertalian darah) saja tentunya akan menjumpai kesukaran untuk menentukan batas-batas kediaman mereka ; maka oleh karena itulah gabungan dari kedua unsur pengikat tersebut, unsur territorial dan unsur geneologis kita dapati sebagai unsur pengikat persekutuan hukum di Minangkabau (Nagari).

Faktor geneologis yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor geneologis yang dilihat dari keturunan ibu, yang disebut orang dengan istilah Matrilineal. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu dan unsur inilah yang memegang peranan didalam organisasi masyarakat Minangkabau.

Sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau, yaitu dijumpai suatu persekutuan hukum yang disebut Paruik. Yang dimaksud dengan sebuah Paruik ialah suatu keluarga besar (family). Hanya saja keluarga disini harus diartikan keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-suami dari anggota-anggota paruik tidak termasuk di dalamnya.

Sebuah paruik terdiri dari : ibu, saudara-saudara laki-laki ibu, saudara-saudara perempuan ibu, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara nenek perempuan, anak-anak perempuan dari nenek perempuan, anak laki-laki ibu, anak-anak perempuan ibu, anak-anak laki-laki dari pada saudara-saudara perempuan ibu, anak-anak laki-laki dari anak-anak saudara-saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan dari anak-anak saudara perempuan ibu, nenek perempuan, saudara-saudara laki-laki dari nenek perempuan, saudara-saudara perempuan dari nenek perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara

perempuan moyang, ibu nenek perempuan (moyang), saudara-saudara laki-laki moyang, saudara saudara perempuan moyang, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan puyang (ibu dari moyang), anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan puyang semuanya meliputi lima generasi kalima kali turun. Didalam sebuah paruik yang berkuasa juga orang laki-laki dari garis ibu, yang dinamakan Kepala Paruik atau biasanya disebut Penghulu Andiko.⁵⁵

Penghulu Andiko tadi mempunyai dua fungsi : pertama-tama sebagai mamak dari jurainya (jurai tertua) dan sebagai penghulu dari sebuah paruik. Sebagai mamak, sebagai kepala jurai yang tertua dari sebuah paruik, setarafilah beliau dengan mamak-mamak yang lain didalam keluarga tersebut, akan tetapi sebagai penghulu dia lebih tinggi dari yang lain-lain, karena didalam posisi ini beliaulah satu-satunya yang mewakili keluarga besar itu. Apabila anggota sebuah paruik itu kian lama kian bertambah, maka sebuah paruik tadi lalu membentuk atau membelah diri menjadi kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri yang bernama Jurai. Yang dimaksud dengan jurai adalah keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya. Apabila paruik telah beranak-anak menjadi jurai, mereka mendirikan rumah berdekatan maka jadilah apa yang dinamakan kampung-kampung. Yang berkuasa didalam jurai ialah mamak, saudara laki-laki tertua dari ibu.

Didalam pertumbuhan selanjutnya berkembanglah kesatuan-kesatuan Matrilineal baru tersebut disamping paruik asalnya, merupakan lingkungan

⁵⁵ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta Tahun 1997, halaman 10.

pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, inilah yang dinamakan Suku. Apabila sebuah paruik, anggota-anggotanya berkembang begitu banyak sehingga timbullah cabang dari paruik itu (jurai) sebagai satu kesatuan baru, dan apabila ini terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya kita menjumpai suatu lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu. Lingkungan ini merupakan kesatuan yang dinamakan Suku.

Suku adalah suatu kesatuan masyarakat, dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Suku tidak merupakan persekutuan hukum hanya bagian-bagian suku yang merupakan persekutuan hukum. Persekutuan yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu, sama sekali suku tidak terikat kepada suatu daerah tertentu, terhadap anggota-anggotanya, suku mempunyai batas yang personal ; dimana saja anggota-anggota suku itu berada mereka tetap merasakan pertalian darah dengan segenap sanak-sanak mereka yang sesuku. Didalam perkembangan selanjutnya beberapa buah suku bersama-sama menempati suatu daerah tertentu (disini tampak dan muncullah faktor-faktor territorial) yang bernama Nagari. Nagari adalah persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genelogis dan faktor territorial.

Biasanya didalam nagari kita jumpai sedikit-dikitnya empat buah suku, akan tetapi sebagai ideal typus (bayangan pikiran saja) kita dapat memikirkan didalam nagari sekurang-kurangnya masih ada dua buah suku dan tidaklah mungkin sebuah saja, karena suku didalam nagari itu mempunyai fungsi eksogam.

A.2.2. Hukum Adat Masyarakat Minangkabau

Di Minangkabau, adat yang telah beberapa lama dipakai sejak turun-temurun terdiri dari empat macam yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya adat)

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi telah merupakan Undang-Undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : Murai Bakicai, Sapi Malanguah, Kabau Mangowek (murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguwék). Jadi merupakan hukum kodrat (*lex naturalis*) yang demikian dijemakan alam. Keadaan “Nan Sabana Adat” ini juga dimaksudkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertua didalam ALQuran serta menurut sepanjang syarak tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah SWT.

2. Adat Nan Diadatkan

Ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan berserta Dt Perpatih Nan Sabatang. Adat Nan Diadatkan terdiri dari :

a. Cupak Nan Duo :

1. cupak usuali, dalam arti yang sebenarnya ialah seruas bamboo yang dipakai sebagai alat buatan menentukan takaran isi. Akan tetapi disini Pengertian cupak didalam perkataan “Cupak Usuali” bermakna

dalam Pengertian yang simbolis, yaitu segala sesuatu yang dijemakan alam (usali = asal= natur/alam = Tuhan).

2. cupak buatan, apabila hanya ada cupak usali saja, tentu keadaan selalu akan kacau, maka untuk menimbulkan tata dalam masyarakat, untuk menimbulkan keseragaman didalam hidup bersama, supaya ada hukum dan segala sesuatu berjalan menurut hukum, maka oleh kedua pengatur tata alam Minangkabau Dt Katumanggungan serta Dt Perpatih Nan Sabatang dibuatlah apa yang dinamakan Cupak Buatan

b. Koto Nan Ampek terdiri dari :

1. Koto Pusaka ialah kata yang berasal dari ninik Dt Katumanggungan serta Dt Perpatih Nan Sabatang, yang kemudian kata itu dijadikan pedoman serta ukuran didalam menyusun hidup bersama bagi orang-orang Minangkabau serta ukuran jangka, lukis lembaga, baris belebas dan sebagainya.
2. Kato Mufakat, yaitu aturan-aturan hidup bersama yang dibuat dalam suatu mufakat, mungkin permufakatan satu-satu luhak atau satu laras atau satu-satu nagari
3. Koto Dahulu Ditepati, istilah "kata" disini juga mempunyai arti arti kiasan. Yang dimaksud ialah kebiasaan-kebiasaan yang telah dipakai, yang telah ada sebelum kedua ninik Datuak Nan Berdua. Jadi maksud "kata dahulu kata ditepati" yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dahulu diteruskan saja pemakaiannya oleh generasi berikutnya.

4. Kato kemudian Kato Bacari, oleh karena kata dahulu”banyak yang kurang baik” dan kurang patut dipakai, maka dicarilah mana yang baik, mana yang memberi kebahagiaan pada isi nagari.

c. Undang-Undang Nan Ampek terdiri dari :

1. Undang-undang Luhak/Rantau, ini adalah aturan mengenai bagaimana susunan luhak dan dirantau.
2. Undang-Undang Nagari, ini mengenai aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang dipunyai oleh tiap-tiap Nagari
3. Undang-Undang didalam Nagari, biasanya disebut Undang-undang orang didalam nagari, yang dimaksudkan ialah aturan perdata, yaitu aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain (dalam kedudukan yang setaraf sebagai anak nagari).
4. Undang-Undang Nan Duopuluh, Undang-undang ini merupakan aturan hukum pidana yang mencakup macam-macam kejahatan.

Undang-undang nan duopuluh ini dibagi yaitu :

- a. Undang-Undang Nan Salapan (delapan).
- b. Undang-undang Nan Duobaleh (duabelas)

Jadi Undang-undang duapuluh ini mengatur hubungan anak nagari (penduduk nagari) dengan nagari sebagai kesatuan kenegaraan, didalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak nagari, dalam hubungan Gesubardineerr (hubungan antara rakyat dan penguasa/terhadap inilah berlaku kata adat.

d. Nagari Nan Ampek terdiri dari :

1. Teratak ialah tempat kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampung atau nagari.
2. Dusun ialah teratak yang telah berkembang, bertambah dengan rumah-rumah baru, maka teratak itu berubah menjadi dusun.
3. Kato adalah daerah pusat dari daerah mana kemudian berkembang menjadi nagari.
4. Nagari, jadi apabila koto itu telah rapat penduduknya, maka dicarilah tanah-tanah baru yang kemudian berkembang menjadi kampung-kampung dan bersama-sama kampung itu membentuk sebuah nagari.
3. Adat Nan Teradat ialah adat yang terpakai yang berbeda didalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat.
4. Adat-istiadat ialah aturan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda.

A.3. Sistem Pewarisan Adat Matrilineal Pada Masyarakat Minangkabau

Mengenai sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat Matrilineal di Minangkabau, ini berarti dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal ini mungkin disebabkan

karena adanya perbedaan hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang di hitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan susunan kekerabatan Matrilineal, maka anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka rendah yaitu harta yang turun-temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal itu adalah ayah, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Ada pepatah adat Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman yang berbunyi : “Pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka”.

Memang didalam tata susunan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan hukum ibu, kita menjumpai suatu tertib aturan “bermamak-mamakan” tentu kita sama bertanya dalam hati apakah sebabnya timbul tertib”bermamak-mamakan itu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal⁵⁶, menurut legenda adalah sebagai berikut : pada suatu ketika berlayarlah Dt Katumanggungan dengan Dt Perpatih Nan Sabatang dari rantau Tiku Pariaman kenegeri Aceh. Belum lama berlayar, kandaslah perahu itu diatas pasir, karena air pasang surut. Berkatalah kedua datuk itu kepada anak-kamanakan sekalian, supaya menghela

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal, Masyarakat Minangkabau Di Semarang, Pada Tanggal 21 Mei 2003.

perahu itu bersama-sama, akan tetapi anak-anaknya tidak mau menolong hanya kamanakan saja yang mau menghela perahu itu.

Ditegaskan menurut legenda itu bahwa anak hanya menyukai yang senang, yang enak saja sedangkan untuk bersusah payah tidak disukainya. Dengan demikian pusaka diturunkan kepada kamanakan sebagai balas jasa jerih payah kamanakan yang kemudian hal itu menjadi adat sampai sekarang.

Sedangkan menurut Bapak Akhyar⁵⁷, disamping legenda diatas ada legenda lain, hal ini asalnya pada suatu ketika, dahulu sang bapak ingin melaksanakan pekerjaan berat, yaitu meneruko (membuka sawah baru) sawah, yaitu segala sawah-sawah yang dewasa ini kita lihat terdapat dibawah kaki gunung Merapi dan Singgalang di Minangkabau, maka untuk melaksanakan kerja berat itu kamanakanlah yang banyak menolong. Juga sebagai pembalasan jasa harta pusaka itu diturunkan kepada kamanakan sehingga inilah yang menjadi awal segenap hubungan dalam tertib "bermamak-mamakan".

Apabila kedua legenda itu kita gabungkan kita dapat memperoleh kesimpulan, bahwa pada suatu masa dahulu, bapak-bapak di Minangkabau selalu menghadapi pekerjaan /soal-soal yang berat yang tidak sanggup di selesaikan sendiri. Pekerjaan itu membutuhkan pertolongan dan didalam menolong itulah kamanakan yang lebih berjasa dari pada anak.

Demikianlah sebagai pembalasan jasa kamanakan diberikanlah harta pusaka kepada kamanakan, bukan kepada anak sehingga akhirnya pertalian antara mamak-kamanakan itu merupakan lingkungan hubungan yang lengkap. Legenda

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Akhyar , Masyarakat Minangkabau Di Semarang, Pada Tanggal 22 Mei 2003.

yang historis itu tentu tidak usah kita terima mentah-mentah, bahkan sebaliknya dapat direnungkan dengan pandangan pikiran kita asal timbulnya tertib”bermamak-mamakan itu”. Tertib bermamak-mamakan itu hanya merupakan konsekuensi saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang Matrilineal.

A.3.1. Harta Warisan Dalam Hukum Adat Waris Minangkabau

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya terdiri dari :

a. Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi yang berupa tembilang basi yaitu harta tua yang diwaris turun-temurun dari mamak kepada kamanakannya, maupun tembilang perak yaitu harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kamanakan dan tidak boleh diwariskan pada anak-anaknya.

b. Harta pusaka rendah

yaitu harta yang turun dari satu generasi

c. Harta pencaharian

yaitu harta yang diperoleh melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada jurainya. Sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan ini di wariskan pada anaknya ini. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu

“harta pencaharian harus di wariskan paling banyak satu per tiga (1/3) dari harta pencaharian untuk kamanakan⁵⁸.

d. Harta Suarang

Untuk menyebutkan harta suarang ini ada beberapa, diantaranya : harta pasuarang, harta Basarikatan, harta kaduo-duo, harta salamobaturaton, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa perkawinan, tidak termasuk dalam harta suarang ini, yakni harta bawaan suami atau harta dapatan istri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Dengan demikian jelaslah, bahwa harta pencaharian berbeda dengan harta suarang.

A.3.2. Ahli Waris Dan Hak Mewaris Menurut Adat Minangkabau

Sebagaimana diketahui “kaum” dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan “tanah ulayat” kaum serta anggota kaum diwakili leluhurnya oleh seorang “mamak kepala waris”. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri dari kamanakan dan kamanakan ini adalah ahli waris. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan menjadi dua :

⁵⁸ Mansyur Dt Nagari Basa, *Hukum Waris Tanah Dan Peradilan Agama Mengenai Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma Tahun 1968, halaman 137.

a. Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampuk), waris sejangka (waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta) masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, artinya selama waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada maka waris sehasta belum berhak mewaris.

b. Waris bertali adat

Yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak mewarisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian sendiri untuk waris bertali adat sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut :

- Menurut caranya menjadi waris : waris batali ameh, waris batali suto, waris tambilang basi, waris timbilang perak.
- Menurut jauh dekatnya terdiri dari : waris di bawah daquek, waris di dada, waris di bawah pusat, waris di bawah lutut.
- Menurut datangnya yaitu : waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu.

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing ahli waris yang disebutkan diatas satu sama lain berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan ia warisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya. Hal ini tersebut dapat terlihat dalam paparan di bawah ini :

1. Mengenai harta pusaka tinggi

Apabila harta peninggalan ini menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwaris oleh ahli waris dan tidak di perkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan "Genggam Bauentuek". Walaupun tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan persetujuan dan seijin seluruh ahli waris. Disamping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan guna keperluan :

- Untuk membayar hutang kehormatan.
- Untuk membayar ongkos memperbaiki Bandar sawah kepunyaan kaum.
- Untuk membayar hutang darah.
- Untuk menutup kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai.
- Untuk ongkos naik haji ke mekah.
- Untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.

2. Mengenai harta pusaka rendah

Semua harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang di warisi para jurai

atau sedikit-tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh hukum Islam, maka seorang ayah dengan harta pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan tanah pusaka istrinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membekali istri dan anaknya manakala ayah telah meninggal dunia.

3. Mengenai harta suarang

Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian sebab harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami-istri secara bersama-sama dalam perkawinan. Di daerah Minangkabau pembagian harta suarang adalah sebagai berikut :

- a. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
- b. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut :
 - o Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua, separoh merupakan bagian pewaris suami dan separoh lagi merupakan bagian janda.
 - o Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.

- c. Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dinagi dua antara bekas suami dan bekas istri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
- d. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut : jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Berkaitan dengan perubahan harta suarang, dibawah ini akan ditunjukkan Beberapa putusan pengadilan mengenai harta suarang sebagai bukti bahwa antara suami-istri orang Minangkabau dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi kerja sama dalam satu kesatuan unit yang disebut Somah (Gezin) sehingga terbentuklah harta keluarga.

1. Putusan Landraad Talu tanggal 23 Januari 1937 Nomor 5 Tahun 1937 yang dikuatkan oleh Raad Van Jastitie pada tanggal 13 mei 1937 (T.1488/508) menentukan bangunan yang didirikan atau tanaman yang ditanam diatas harta kaum istri bukan harta suarang.
2. Putusan Landraad Payah Kumbuh tanggal 13 Juni 1938 Nomor 11 Tahun 1938 yang dikuatkan Raad Van Justitie Padang Tahun 1938 menyatakan : bila suami meninggalkan beberapa orang janda, maka pembagian harta suarang menjadi pusaka rendah jurai si suami dan separoh lagi merupakan bagian para janda yang masih hidup.

3. Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 46/1953 tanggal 26 September 1953 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 maret 1956 Nomor 23/1954 yang menetapkan, bahwa harta suarang bertanggung jawab atas hutang suami, kemudian adanya rumah diatas tanah kaum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa rumah itu kepunyaan kaum, mungkin saja rumah itu kepunyaan suami-istri bersama sebagai harta suarang.

Selanjutnya berkaitan dengan berbagai persoalan yang menyangkut hukum waris di Minangkabau, pada tahun 1971 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang pembinaan hukum nasional atau Babin Kum Nas) pernah mengadakan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan hasil sebagai berikut :

- a. Harta pusaka diwariskan kepada kamanakan sedangkan harta yang diperoleh diluar harta pusaka boleh diwariskan pada anak-anaknya.
- b. Harta pencaharian diwariskan pada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem Faroid atau tidak, yang penting bahwa harta pencaharian itu di peruntukan guna kepentingan anak-anaknya.
- c. Apabila pihak istri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan mengembalikan harta tersebut pada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli warisnya (kamanakan)

suaminya, dalam hal demikian kerapatan nagari yang diberi wewenang memutuskan secara damai.

- d. Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh pada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh pada kamanakannya sebab mamak laki-laki itu tidak dibesarkan, dididik dan bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarnya jika kamanakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian.
- e. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang di peruntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kamanakan untuk memenuhi pepatah adat “Anak dipangku, kamanakan dibimbing” sehingga anak-anak yang suku ibunya dan kamanakannya yang termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku dalam arti dibesarkan dididik, dan di pertanggung jawabkan baik fisik maupun rohaninya. Demikian pula kamanakan yang termasuk kaum mamak harus dibimbing artinya harus dipelihara sama dengan anaknya. Dengan demikian seorang ayah yang sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kamanakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kamanakannya.⁵⁹

⁵⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Intisari Bandung, Mandar Maju, halaman 37.

A.4. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang Dan Perubahan Pelaksanaannya

Orang-orang Minangkabau yang merantau di Semarang, dimana suami-istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri. Di perantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya, induak-bakopun telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru.

Berdasarkan penelitian dilapangan yaitu pada perkumpulan masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang dan pendapat dari responden Bapak Masril Sofyan, bahwa dalam pembagian warisan asas pewarisan dalam masyarakat Matrilineal yang menentukan hanya anak perempuan yang menjadi ahli waris, tidak lagi mereka gunakan , yang digunakan ialah asas pewarisan pada masyarakat Parental, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan tetap mendapat harta warisan dengan hak yang sama.⁶⁰

Demikian juga dengan harta pencaharian yang di tinggalkan seorang suami maka anaknya bukan merupakan ahli waris, sebab anak-anaknya itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Sehingga harta pencaharian tetap diwaris oleh saudara sekandung dari bapak. Tetapi dengan makin eratnya hubungan antara orang tua dengan anak serta pengaruh dari hukum kewarisan setempat di

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang Di Semarang, Pada Tanggal 30 Mei 2003.

Semarang (Jawa) yang menganut sistem kewarisan Parental sehingga dalam hal ini anaknyalah sebagai ahli waris. Namun demikian dalam pembagian warisan kadang-kadang harta peninggalan orang tua merupakan harta-harta yang keramat, maka harus dilestarikan sehingga keberadaan harta tersebut tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat responden Bapak Agung⁶¹ memberikan pandangan tentang pembagian warisan bahwa harta-harta peninggalan orang tua merupakan harta keramat dan perlu dilestarikan. Untuk melestarikannya harus diturunkan kepada anak-anaknya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dikalangan masyarakat perantau Minangkabau yang berada di Semarang harta warisan dibagikan yang paling utama adalah kepada anak-anaknya, karena anak adalah buah hati dan merupakan harta karunia dari yang kuasa untuk itu pelaksanaan pembagian warisan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut Bapak Masril Sofyan mengatakan⁶² dalam pembagian warisan terhadap anak-anaknya, bagi masing-masing masyarakat Minangkabau perantau di Semarang sebelum orang tua meninggal telah diwariskan harta kepada anak-anaknya, hal ini dilakukan untuk menghindari pewarisan yang ada pada masyarakat Matrilineal, hanya anak perempuan yang bisa mewaris, disamping itu juga tujuannya adalah agar anak-anak baik laki-laki dan perempuan kelak setelah di tinggalkan dapat melangsungkan hidupnya.

Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila ia meninggal dunia hartanya digugat oleh kamanakannya, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semasa hidup hartanya kepada anak-anaknya

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agung, Warga Minang Di Semarang, Pada Tanggal 1 Juni 2003.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Masril Sofyan, Pada Tanggal 2 Juni 2003.

yang diinginkan, menggantikan miliknya tersebut apabila si bapak telah berpulang yaitu dengan jalan hibah wasiat.

Kalau tidak demikian, para kamanakan yang menganggap pula mereka berhak atas harta peninggalan mamaknya, akan menuntut pula bagian mereka setelah mamak (bapak si anak) mereka meninggal. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berakhir sampai disitu saja. Setelah si bapak nantinya betul-betul meninggal, apakah si anak langsung memperoleh harta peninggalan bapaknya yang telah diberikan kepadanya secara hibah. Macam-macam hal terjadi mengenai masalah ini adalah :

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak-anaknya sedangkan para kamanakan tidak menggugat.
2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak-anaknya digugat oleh para kamanakan. Jika hal tersebut tidak selesai secara mufakat, Pengadilanlah yang akan memutuskan.
3. Anak-anak yang memperoleh pusaka itu dari hibah ayahnya, memberikan sebagian dari harta tersebut kepada kamanakan si ayah. Misalnya : dihibahkan oleh ayahnya enam piring sawah kepada anak-anaknya setelah ayah meninggal, si anak tadi dengan rela memberikan dua piring sawah tersebut kepada kamanakan ayahnya.

Terlepas dari segala kemungkinan-kemungkinan tersebut pada pokoknya penyelesaian hal tersebut diatas kembali di dasarkan atas rundingan-rundingan yang keputusan-keputusannya nanti diambil atas dasar mufakat. Hal ini dapat diambil contoh dalam kasus yang terjadi, yaitu keluarga Bapak Yahirman

Pensiunan AL (Angkatan Laut) yang pindah dari Pariaman, Padang pada tahun 1982, mereka hidup di Semarang dengan buka usaha Rumah Makan Padang, dan meninggal pada tahun 1990 dengan meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri.

Sebelum meninggal Bapak Yahirman telah mewariskan hartanya kepada anak-anaknya yang berupa :

1. Satu buah rumah yang berada di jalan Sukun.
2. Satu buah Rumah Makan yang berada di jalan Pemuda.
3. Dua buah mobil.
4. Empat buah sepeda motor.

Sebelum meninggal Bapak Yahirman telah menghibahkan harta-harta tersebut kepada anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satu buah rumah susun yang berada di jalan Sukun diwariskan kepada anak perempuan (anak terakhir).
- b. Satu buah rumah makan yang berada di jalan Pemuda di wariskan kepada anak laki-laki nomor dua.
- c. Sedangkan untuk dua buah mobil dan empat buah sepeda motor di wariskan kepada anak yang pertama.

Perlu diketahui bahwa pewarisan terhadap harta-harta tersebut telah disepakati oleh anak-anak dan istrinya, dan anak-anak serta istri mereka tidak akan menuntut di kemudian hari. Sedangkan untuk istri akan mendapat pengambilan pensiunan dari suaminya. Pernyataan hibah tersebut dibuat sewaktu

Bapak Yahirman masih hidup pada tahun 1989 sewaktu beliau masih dalam keadaan sakit.

Dari kasus tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang tidak menggunakan asas Matrilineal, yang hanya memberikan hak waris kepada anak perempuan dan untuk menghindari asas tersebut telah digunakan cara yaitu penghibahan terlebih dahulu pada anak-anaknya.⁶³

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pembagian warisan masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang digunakan asas pewarisan pada masyarakat Parental, yaitu tidak membedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dalam pembagian warisnya.

Menurut pendapat Bapak Syaifuddin yang berada di jalan Parangkusuma I No.14 Semarang mengenai pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang, semua tergantung dari keluarga masing-masing, dalam arti jika keluarga tersebut menganut asas pewarisan pada masyarakat Matrilineal, maka anak laki-laki tidak mendapat warisan, dan waris tersebut akan jatuh ke tangan anak perempuan, akan tetapi ada juga yang menggunakan cara pewarisan seperti masyarakat Parental, ialah waris dibagi sama rata tanpa membedakan jenis kelamin anak sehingga dalam pembagian warisan menganut adat setempat atau adat mereka.⁶⁴

Menurut pendapat Enny Ivo yang berada di jalan layar No. 91 Semarang, keberadaan pembagian warisan dalam lingkungan masyarakat Minangkabau

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri, Pada Tanggal 1 Juni 2003.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaifuddin, Warga Minang Di Semarang, Pada Tanggal 8 Juni 2003.

perantau yang berada di Semarang adalah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada adat setempat, sehingga pelaksanaan pembagian tidak menganut asas yang mereka bawa dari asalnya. Tergantung dari sistem kewarisan yang berlaku, misalnya hukum setempat menganut sistem kewarisan masyarakat Matrilineal, maka masyarakat Minangkabau perantau juga menganut sistem tersebut, demikian sebaliknya jika adat setempat menggunakan sistem pewarisan masyarakat Parental atau Matrilineal, maka yang digunakan adalah sistem kewarisan masyarakat yang dianut adat setempat.⁶⁵

Sedangkan menurut Bapak Arifin Effendi yang beralamat di jalan yudistira No. 19 Semarang, pelaksanaan pembagian warisan dari orang tua tetap akan dibagikan kepada anak-anak mereka, karena anak-anak adalah penerus, serta menjunjung tinggi derajat orang tua walaupun orang tua telah meninggal, dengan anak-anaknya mereka masih dikenang. Untuk pembagian warisan masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang menganut asas setempat.⁶⁶

Secara umum, berdasarkan penelitian diketahui bahwa masyarakat Minangkabau perantau di Semarang membagi harta warisannya seperti pada masyarakat Parental, ialah warisan dibagi sama rata diantara masing-masing tanpa perbedaan jenis kelamin anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan (Semarang) dan pendapat bahwa orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan demikian maka masyarakat Minangkabau perantau telah meninggalkan pembagian warisan menurut adat Minangkabau (Matrilineal).

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Enny Ivo, Warga Minang Di Semarang Pada Tanggal 2 Juni 2003.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arifin Effendi, Warga Minang Di Semarang Pada Tanggal 8 Juni 2003.

Mengenai pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau yang boleh mewaris adalah jenis keturunan dari ibu, jika yang meninggal suami maka yang berhak mewaris adalah saudara suami beserta anak-anaknya. Waris yang menganut garis keturunan dari pihak ibu adalah adat di Minangkabau yang disebut sistem Matrilineal. Menurut adat yang ada di Jawa, bahwa tiap-tiap anak di Jawa berhak mendapat bagian yang layak berdasarkan atas prinsip hukum yang sama dari tiap-tiap waris. Bahwa seorang anak tidak boleh di hilangkan hak waris dalam arti bahwa ia tidak diberi hak bagian dari harta benda orang tuanya. Yang pantas untuk dijadikan dasar material guna membentuk harta keluarga baru, apa yang disebut pantas itu harus diperhitungkan menurut tiap-tiap keadaan.

A.4.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Semarang

Perubahan sosial pasti akan terjadi karena tumbuhnya kesadaran sosial dari anggota masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan.

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial karena kemajuan teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap suatu sistem sosial tertentu cenderung untuk diikuti oleh sistem yang lain karena semuanya selalu dalam keadaan ketergantungan. Sehingga dapatlah dipahami bahwa ini juga berkaitan dalam sistem kemasyarakatan adat yang juga mengalami perubahan tidak selalu bersikeras dengan hukum adatnya pastilah semua akan selalu berubah baik secara cepat maupun lambat.

Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya akan menyangkut hampir semua aspek atau segi masyarakat. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai, pola perilaku, organisasi, norma-norma, susunan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial intinya perubahan itu dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial. Hal demikian dapat kita lihat langsung didalam perkembangan dan perubahan pada masyarakat adat di Indonesia yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima atau berusaha menolak dari perkembangan atau perubahan itu secara tidak sadar mengalami kegoncangan didalam struktur keadatannya yang mengakibatkan kelonggaran-kelonggaran yang memasukkan perkembangan-perkembangan itu kedalam struktur keadatannya.

Hal demikian pada penelitian ini dapat dilihat pada perubahan dan perkembangan pada masyarakat Minangkabau perantau. Susunan masyarakat dan keluarga Minangkabau menurut adat lama pusaka usang. Lama sudah susunan tersebut dipakai sebagai dasar kehidupan orang Minangkabau, akan tetapi dengan berkembangnya jaman, dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan hidup kearah yang lebih modern susunan lama itu juga mengalami perubahan-perubahan.

Dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, secara evolusi, kadang-kadang tidak disadari oleh subjeknya sendiri, kehidupan hukum orang Minangkabau telah berkembang kearah susunan yang baru. Orang-orang Minangkabau yang merantau, dimana suami-istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tidak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari

pencapaian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri.

Dengan demikian terbentuklah keluarga baru yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya, ayah mengambil kedudukan yang penting. Biasanya si ayah bertindak sebagai pimpinan keluarga yang didampingi oleh istrinya. Seorang bapak yang nanti khawatir apabila ia meninggal dunia, hartanya digugat oleh kamanakan-kamanakannya, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semasa hidup hartanya kepada anak-anak yang diinginkan menggantikan milik tersebut apabila si bapak telah berpulang, yaitu dengan jalan hibah wasiat. Oleh karena itu didalam lapangan kewarisan masyarakat Minangkabau perantau telah mengalami perubahan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Perantauan/ Imigrasi

Orang Minangkabau yang merantau di Semarang, dimana suami-istri pergi menetap keluarga dari daerah Minangkabau, mereka tidak bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencapaian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri. Di perantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya, induak bakopun telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri. Anak-anak mereka ini juga tidak pernah atau jarang sekali mengetahui bahwa

dikampung mereka masih ada mamak serta bakonya, umumnya tidaklah lagi mengetahui suasana menurut susunan adat tersebut, sehingga apabila tiba masanya bagi mereka berumah tangga, mereka membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, seperti keluarga didalam mana mereka dibesarkan.

Adanya perpindahan penduduk atau orang dari daerah terpencil ketempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik daerah asalnya (kampung halaman), serta beralih kesifat hidup yang lebih baik di daerah perantau,. Pengaruh bagi hukum waris misalnya di daerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem Matrilineal maka ia cenderung mengikuti sistem di daerah perantau yaitu hukum waris berdasarkan sistem Parental.

2. Karena makin eratnya ikatan keluarga dan melonggarnya ikatan clan dan suku

Didalam lingkungan sanak, keluarga Minangkabau sesuai dengan kebutuhan hidup modern, telah dapat kita lihat tumbuhnya perkembangan-perkembangan ; perkembangan-perkembangan yang sebenarnya telah menimbulkan hukum adat baru. Misalnya dalam bidang kewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kamanakan-kamanakan, karena anak disini sebagai penerus generasi.

3. Faktor Agama

Tidak dapat dipungkiri lagi dengan masuknya Islam ke Minangkabau serta sejak beberapa lama telah berjalan berakar dengan

adat, Islam secara *Penetration Pacifique*, dengan cara damai dan berangsur-angsur memelopori susunan baru di Minangkabau. Begitu hebatnya pengaruh agama Islam di Minangkabau, sehingga dapat dikatakan hampir seluruh orang Minangkabau memeluk agama Islam, serta banyak pula aturan-aturan Islam yang telah dirasakan sebagai adat (yaitu, adat telah meliputi aturan-aturan ilmu fiqih) seperti dapat kita lihat pada aturan-aturan adat didalam hukum acara : karenah, baenah, dan sebagainya.

Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga, yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga Islam memelopori susunan keluarga baru. Didalam perkembangan susunan baru ini lembaga hukum Islam sering dipakai untuk lebih merapatkan hubungan antara anak dengan bapak. Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila dia meninggal dunia, hartanya digugat oleh kamanakan-kamanakan maka ia menghibahkan kepada anak-anaknya. Disamping itu ada pula sebagian masyarakat Minangkabau di Semarang membagi warisannya berdasarkan hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka telah menganggap hukum Islam sebagai aturan hidup mereka.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi rasional dari sebelumnya, jadi lebih banyak memakai lagi perhitungan, pertimbangan segi-segi negatif dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apabila sesuatu yang bermanfaat atau sehingga berkurang sifat

berpikir spekulatif atau menyerah pada keadaan. Kemajuan pendidikan telah tampak jelas pula, bukan hanya bagi anak-anak Minangkabau yang bersekolah di luar Minangkabau, akan tetapi di tanah Minangkabau sendiri semangat buat belajar menuntut ilmu telah berkobar, bahkan samapi ke nagari-nagari dan ke kampung-kampung. Terutama bagi masyarakat Minangkabau yang merantau karena dipengaruhi kebudayaan setempat yang menurut mereka lebih baik sehingga apabila mereka telah selesai kuliah dan kembali ke kampung halamannya mereka melakukan perubahan

B. PEMBAHASAN

B.1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat

Minangkabau Perantau Di Kota Semarang

Karena sudah lama menetap di perantauan (Semarang) maka masyarakat Minangkabau didalam kehidupan kesehariannya mengikuti adat yang berlaku didalam masyarakat Semarang termasuk dalam hal kewarisan yang dulu mereka menggunakan sistem pada masyarakat Matrilineal, dan karena pengaruh adat istiadat setempat maka mereka berubah menggunakan sistem pada kewarisan masyarakat Parental, dimana kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama didalam menerima warisan.

Namun demikian dalam pembagian warisan kadang-kadang harta peninggalan orang tua merupakan harta-harta yang keramat, maka harus dilestarikan, sehingga keberadaan harta terebut tetap. Hal ini sesuai dengan

pendapat responden Bapak Masril Sofyan yang memberikan pandangan tentang pembagian warisan bahwa harta-harta peninggalan orang tua merupakan harta keramat dan perlu dilestarikan. Untuk melestarikan harus diturunkan kepada anak-anaknya, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki.

Dikalangan masyarakat perantau Minangkabau yang berada di Semarang harta warisan dibagikan yang paling utama adalah kepada anak-anaknya, karena anak adalah buah hati dan merupakan harta karunia dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu pelaksanaan pembagian warisan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan, lebih lanjut Bapak Masril Sofyan mengatakan, dalam pembagian warisan terhadap anak-anaknya, bagi masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang berdasarkan hasil penelitian maka sebelum orang tua meninggal telah diberikan atau diwariskan hartanya kepada anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pewarisan yang ada pada masyarakat Matrilineal, ialah hanya anak perempuan yang bisa mewaris, disamping itu juga tujuannya adalah agar anak-anak baik laki-laki maupun perempuan kelak setelah di tinggalkan dapat melangsungkan hidupnya.

Seorang bapak yang nantinya khawatir yang apabila ia meninggal dunia hartanya digugat kamanakan-kamanakan, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan hibah wasiat. Maksud dari hibah, ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan

pewaris. Maksud kedua, ialah untuk mencegah perselisihan selain dari pada itu, dengan hibah wasiat itu pewaris menyatakan secara mengikat (Bindend) sifat-sifat barang-barang harta yang di tinggalkan, seperti barang pusaka, barang yang dipegang dengan hak sende (gadai) barang yang disewa, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam masalah warisan, masyarakat Minangkabau perantau di Semarang telah meninggalkan hukum waris menurut hukum adat waris mereka dan mengikuti pewarisan menurut hukum setempat (Semarang) yaitu berdasarkan Parental, dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam warisan. Serta adanya perubahan sistem warisan yang Kolektif Keindividual yang dikarenakan adanya pengaruh lingkungan dimana mereka berada.

B.2.Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pembagian Warisan Dan

Cara Penyelesaiannya

Sehubungan dengan adanya pembagian warisan dengan hibah dari orang tua kepada anak-anaknya, yaitu yang terjadi pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang sering terjadi adanya ketidaksamaan dalam penerimaan hibah. Dalam hal ini kebiasaan memberikan hibah kepada anak ternyata jumlah hibah yang diterima masing-masing anak tidak sama. Perbuatan itu dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris oleh karena itu cara untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan : sebelum anak-anak tersebut menerima hibah

dari orang tua, perlu adanya janji atau kesepakatan diantara masing-masing ahli waris untuk menerima hibah tersebut sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Sementara jumlah hibah tersebut tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, misalnya anak-anak yang kurang mampu mendapat hibah yang lebih banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah terlebih dahulu sebelum hibah dilaksanakan.

Akan tetapi hal tersebut tidaklah berakhir sampai disitu saja. Setelah si bapak nantinya betul-betul meninggal, apakah si anak langsung memperoleh harta peninggalan bapaknya yang telah diberikan kepadanya secara hibah tersebut. Macam-macam hal yang terjadi mengenai masalah ini biasanya ada beberapa kemungkinan :

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak-anaknya sedangkan para kamanakannya tidak menggugat.
2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak-anak digugat para kamanakan. Jika hal tersebut tidak diselesaikan secara mufakat, Pengadilan yang akan memutuskan.
3. Anak-anak yang memperoleh pusaka itu dari hibah ayahnya, memberikan sebagian dari harta tersebut kepada kamanakannya si ayah. Misalnya dihibahkan oleh ayahnya enam piring sawah kepada anak-anaknya setelah si ayah meninggal, si anak tadi dengan rela memberikan dua piring sawah tersebut kepada kamanakan ayahnya.

Terlepas dari segala kemungkinan-kemungkinan tersebut pada pokoknya penyelesaian hal tersebut diatas kembali didasarkan atas

perundingan-perundingan yang keputusan-keputusannya nanti diambil atas dasar "Mufakat". Biasanya masyarakat di dalam menghibahkan untuk menghindari percekcoakan kelak dikemudian hari dan demi kepastian hukumnya maka biasanya menghibahkan itu dilakukan dihadapan Notaris. Meskipun hibah wasiat itu berdasarkan akte Notaris, sah atau tidaknya isi hibah wasiat itu dikuasai oleh hukum adat material, misalnya tidak sah suatu pemberian sebuah sawah Kasikepan kepada seorang waris yang bukan teman sedesa.

Hambatan yang lain dalam pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau yang merantau di Semarang adalah adanya gugatan dari kamanakan-kamanakan. Karena para kamanakan yang menganggap mereka berhak atas harta peninggalan mamaknya, akan menuntut pula pembagian mereka setelah mamak (bapak si anak) mereka meninggal.

Dalam pembagian warisan ini harus dibedakan lagi antara harta pencaharian dan harta pusaka. Jika mengenai harta pencaharian harus dilihat dulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya atau kamanakannya. Apabila telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada dibagi antara anak-anak yang masih belum mendapat. Jika pihak bako menuntut pula bagian harta tersebut, diselesaikan hal tersebut dengan jalan mufakat ; yang jika sampai disini belum selesai, tentunya Pengadilanlah yang akan menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan cara wawancara dengan Ibu Lina SH, yang menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Semarang, apabila terjadi kasus waris tersebut diatas maka hukum kewarisan yang dipakai adalah hukum kewarisan dimana kasus tersebut itu berada, karena tugas Hakim adalah mengkonkritkan hukum yang ada didalam masyarakat. Sehingga dalam kasus tersebut yang dipakai adalah hukum kewarisan pada masyarakat Parental yang berlaku di Semarang (Jawa), yaitu anak laki-laki maupun perempuan adalah sama dalam mendapat warisan tanpa adanya perbedaan.⁶⁷

Hal ini akan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar oleh Hakim dalam memutus perkara yang sama, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Mahkamah Agung No.258 K/Sip/1959 Tentang Hukum Adat di Purworejo yang intinya adalah : “Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan harta gono-gini, pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak-anak atau istri (suami) dari yang meninggalkan harta gono-gini. Pertimbangan Mahkamah Agung adalah :
 - o Pembagian harta gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain, selain anak atau istri/suami yang meninggalkan warisan harta gono-gini, menunjukkan bahwa keluarga Jawa bersifat Somah yang terdiri dari anggota-anggota keluarga, ibu, ayah (suami-istri) dan anak-anak saja.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lina, SH Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 30 Juli 2003.

- Bahwa keluarga Jawa terbentuk di karenakan bentuk perkawinan mentas/mencar yang merupakan perkawinan bebas dari pengaruh dan tidak terikat dalam hubungan kekerabatan, sehingga para anggota keluarga lain, seperti keluarga ayah/ibu dan atau kamanakan yang bukan anak/istri/suami (ibu, bapak) tidak berhak ikut campur atau menggugat/ menuntut untuk memisahkan atau membagi-bagi harta gono-gini.
 - Bahwa dasar pertimbangan tersebut dapat menjadi pegangan untuk dipakai pada perkara yang sama, yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang modern, yang berada di daerah perantau dalam hal harta pencaharian walaupun keluarga tersebut tergolong masih ada ikatan kekerabatan Matrilineal atau Patrilineal.
2. Keputusan Mahkamah Agung No. 393 K/Sip/1958 Tentang Hukum Adat Di Daerah Blitar, yang intinya anatar lain, bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh (1/2) dari harta gono-gini.
 3. Keputusan Mahkamah Agung No. 130 K/Sip/1957 Tentang Hukum Adat Di Daerah Bandung yang intinya adalah : "Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dan tiga orang anak, keempat-empatnya berhak atas harta warisan Almarhum".
 4. Keputusan Mahkamah Agung No.187 K/Sip/1959 Tentang Hukum Adat Di Daerah Jombang, yang intinya adalah : " Menurut hukum adat selama janda masih hidup dan belum kawin lagi harta gono-gini yang

dipegangnya serta perlu untuk menjamin penghidupannya, tidak dapat dibagi-bagi”.

Dengan demikian kalau kita lihat kasus diatas maka sebagai ahli waris dari Bapak Yahirman adalah ketiga anaknya dan ibunya, sedangkan kamanaknan bukan ahli warisnya, disamping itu masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang telah mencar atau pisah membentuk keluarga baru yang terdiri dari : ayah, ibu, dan anak-anak sehingga harta yang ada disini adalah harta pencaharian.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 39 K/Sip/1968 Tanggal 12-2-1969 kedudukan anak terhadap warisan orang tua. Dalam perkembangan hukum adat Minangkabau sekarang, harta kekayaan dibedakan dalam dua jenis, ialah harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka tetap menjadi milik kaum masing-masing pihak, sedangkan harta pencaharian diturunkan kepada anak-anak.

B.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang

Dengan begitu pesatnya perkembangan yang ada tidak dapat dihindari terjadinya perubahan-perubahan yang ada dalam hukum adat masyarakat Minangkabau. Perubahan sosial yang terjadi itu dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif. Dampak negatifnya adalah semakin majunya perkembangan tersebut bukan saja berubah keadaan hukum adat tersebut tetapi

juga menghilangkan keaslian dari adat itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya adalah, kemajuan-kemajuan cara berpikir lebih rasional dan adil.

Perubahan-perubahan yang tampak adalah, pada sistem kekeluargaan yang dulu sistem perkawinannya adalah mempertahankan kekeluargaannya didalam perkawinan yang masih dalam sukunya, ini mulai terbuka untuk perkawinan diluar sukunya yang biasa disebut dengan Perkawinan Eksogami. Perubahan yang lain juga tampak pada sistem kewarisan, karena makin eratnya hubungan antara suami-istri dengan anak-anaknya. Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila ia meninggal dunia, hartanya digugat oleh kamanakan-kamanakannya, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semasa hidup hartanya kepada anak-anak yang di tinggalkan menggantikan milik tersebut apabila si bapak telah meninggal dunia, yaitu dengan jalan hibah wasiat.

Dengan demikian ada beberapa faktor-faktor yang mempercepat perubahan pewarisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang adalah sebagai berikut :

Faktor perantauan atau Imigrasi, adanya perpindahan penduduk dari daerah Minangkabau ke kota Semarang dengan tujuan untuk memperbaiki nasib di daerah asalnya. Pengaruh bagi hukum waris misalnya : didaerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem Matrilineal karena mereka lama tinggal di Semarang, maka mereka mengikuti hukum yang berlaku di kota Semarang (Jawa) dalam hal pembagian warisan yaitu dengan hukum waris pada masyarakat Parental.

Karena makin eratnya ikatan keluarga dari melonggarnya ikatan clan dan suku. Didalam lingkungan sanak, keluarga Minangkabau sesuai dengan kebutuhan

hidup modern, dapat kita lihat timbulnya hukum adat baru. Misalnya dalam bidang kewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kamanakan-kamanakan karena anak sebagai penerus generasi.

Faktor yang lain adalah pengaruh agama, Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya sehingga Islam memelopori susunan keluarga baru yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Karena agama Islam sudah dianut turun-temurun dan sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Minangkabau baik yang didaerahnya sendiri maupun yang merantau sehingga aturan-aturan Islam dipakai sebagai pegangan hidup didalam kehidupannya. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempercepat perubahan pelaksanaan kewarisan adalah pendidikan, pendidikan membawa akibat, manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya jadi lebih banyak memakai lagi perhitungan, pertimbangan segi-segi negatifnya dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak sehingga berkurang sifat berpikir spekulatif dan menyerah pada keadaan serta bersifat adil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang telah meninggalkan hukum adat waris mereka dan mengikuti pewarisan menurut hukum adat setempat (Jawa) yaitu berdasarkan asas Parental, dimana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal pewarisan yaitu dengan cara hibah wasiat.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Minangkabau perantau di Semarang adalah jumlah pembagian warisan dengan cara hibah tidak sama, hal ini mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Cara untuk menyelesaikannya adalah terlebih dahulu harus dilakukan adanya musyawarah keluarga baik yang ada di perantau maupun di Minangkabau sehingga adanya kesepakatan masing-masing pihak serta kerabatnya. Disamping itu untuk menjamin kepastian hukum dalam hal hibah wasiat, biasanya orang tua membuat surat wasiat dihadapan Notaris.
3. Perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang terutama dalam hal pelaksanaan

pembagian warisan, dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu : Faktor perantau atau Imigrasi. Adanya perpindahan penduduk dari Minangkabau dengan tujuan untuk mencari penghasilan agar kehidupannya lebih baik di daerah asalnya. Sehingga mereka menetap sebagai warga Semarang, pengaruh bagi hukum waris misalnya di daerah asal menggunakan hukum waris berdasarkan sistem Matrilineal, karena ia sudah lama dan menetap di Semarang maka mereka menyesuaikan adat istiadat setempat sehingga mereka dalam membagi warisan menggunakan sistem kewarisan pada masyarakat Parental, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama didalam pewarisan.

Karena makin eratnya ikatan kekeluargaan dan melonggarnya ikatan clan dan suku, sehingga kedudukan anak lebih diutamakan dari pada kamanakan. Faktor lain yang juga mempercepat perubahan pewarisan masyarakat Minangkabau adalah faktor pendidikan dan agama.

B. SARAN-SARAN

Sebagai akhir penyusunan tesis ini, maka penulis berusaha memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan atau kemukakan disini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dikemudian hari didalam pembagian warisan hendaknya masyarakat Minangkabau perantau di Semarang diperlukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menghibahkan atau mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, agar dimasa mendatang tidak terjadi sengketa harta warisan.

Musyawarah itu bukan hanya dengan keluarga yang ada di Semarang melainkan juga dengan keluarga di Minangkabau. Disamping itu memberikan Pengertian kepada orang tua dan kerabat di Minangkabau bahwa mereka memberikan warisan kepada anak-anaknya karena anak penerus generasi dan sebagai bekal berkeluarga nantinya. Untuk menghindari dan menjamin kepastian hukum perbuatan hukum tersebut maka hibah wasiat itu alangkah baiknya dilakukan dihadapan Notaris, selain itu agar tidak terjadi kekacauan atau permasalahan dikemudian hari dalam hal pembagian warisan maka diperlukan :

1. Musyawarah terlebih dahulu.
2. Mufakat atau kesepakatan bersama.
3. Perjanjian secara tertulis diantara masing-masing pihak yaitu Perjanjian disini yang isinya juga dicantumkan para pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, *Hukum Adat Indonesia*, Renika cipta , Jakarta 1997
- Ariman Rashid, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Hadi Kusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1990
- _____, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980
- _____, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987
- Ketut I Gusti, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty Jogjakarta, 1987
- Muhammad Bushar, *Pengantar Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Bandung, Alumni, 1990
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2000
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, 1981
- Mansyur Dt Nagari Basa, *Hukum Waris Tanah Dan Peradilan Agama Mengenai Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma, 1968
- Mamuji Sri Dan Soekanto Soeryono, *Penelitian Hukum Normatif CV*. Rajawali, Jakarta, 1982
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989

- Netra IB, *Statistik Inferensial, Usaha Nasional*, Surabaya, 1976
- Nasution, *Metode Penelitian Nturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992
- Poespanata Soebakti, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung, 1981
- Rony Syah Ridwan, *Perkawinan Dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Meltan Patra, Jakarta, 1986
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 1998
- Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armila, Bandung 1985
- Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkup Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Soekanto Seoryono, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kunai Sea, Jakarta, 1981
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1972
- Sudiyat Imam, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Jogjakarta, 1978
- Soekanto Seryono, *Masalah Kedudukan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta, 1979
- Soehardy, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT. Sumur Bandung, 1982
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT. Soeroengan, Jakarta, 1954

- Sugangga IGN, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia*, Semarang, 1988
- Sugangga IGN, *Hukum Waris Adat*, University Diponegoro, Semarang, 1995
- Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni Bandung, 1993
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soemitro Hanitijo Rony, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Tanaka B Soeleman, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Wigyodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1974
- _____, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1971
- Vollen Hoven C Van, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1982